

**STUDI KOMPARATIF KONSEP KEPEMIMPINAN
IBN KHALDUN DAN IMAM AL-MAWARDI**

Tugas Akhir

Proposal ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Studi Sejarah Peradaban Islam S-1 pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung.



Disusun oleh :

ALDO ANDRIAN

32501700004

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERABADAB ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

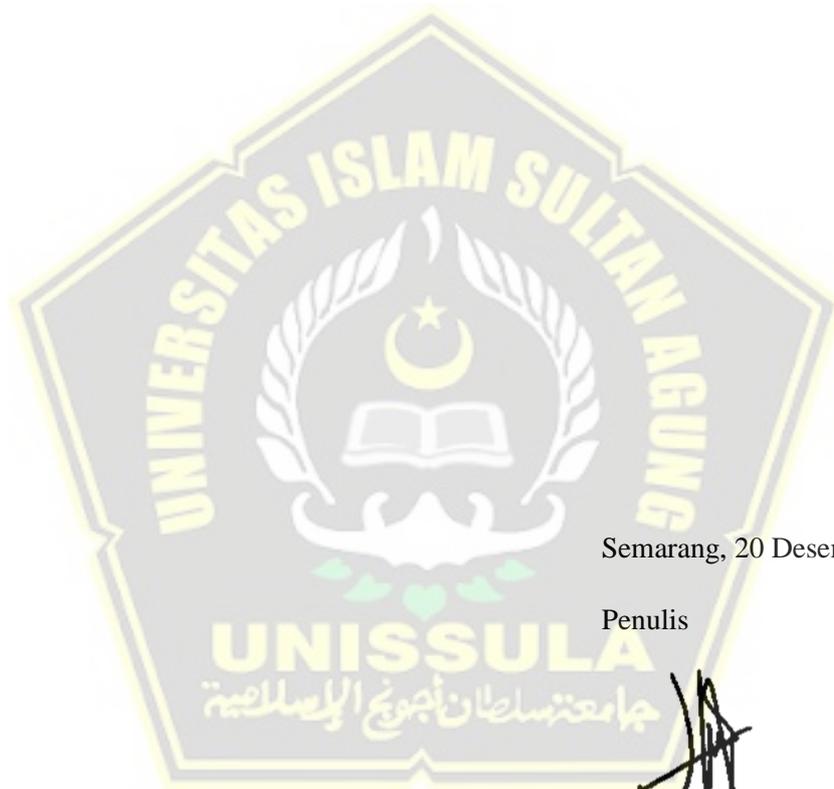
2021

DEKLARASI

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi tidak berisi material yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan, dan
2. Skripsi ini tidak berisi pemikira-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari refrensi penulis jadikan sumber rujukan.



Semarang, 20 Desember 2021

Penulis


Aldo Andrian

NIM³3250170004

HALAMAN NOTA PEMBIMBING

Nama : Dr. Agus Irfan, S.H.I., M.PI
Alamat : jl Rejosari RT 05 RW 04 Genuk Sari , Semarang
Hal : Naskah Skripsi

Nota Pembimbing

Kepada : Yth Dekan Fakultas Agama Islam
Di Semarang

Assalamualaikum. Wr. Wb

Setelah saya bimbing dengan baik dan benar, maka naskah skripsi saudara:

Nama : Aldo Andrian
Nim : 32501700004
Judul :Studi Komparatif Konsep Kepemimpinan Ibn Khaldun dan Imam Al-Mawardi.

Dengan ini saya mohon untuk dimunaqosahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

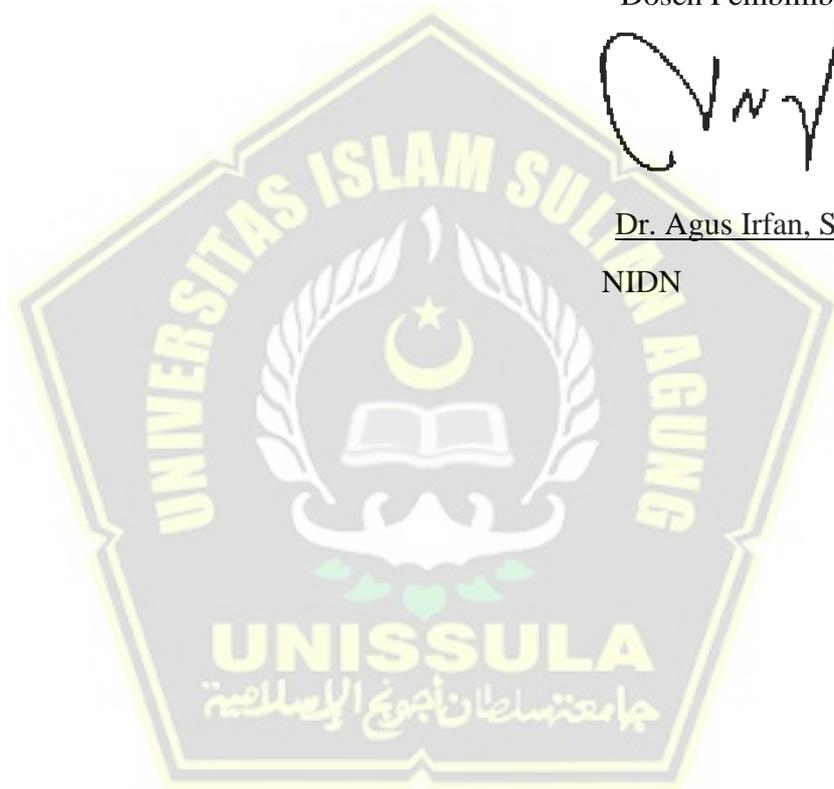
Semarang, 20 Desember 2021

Dosen Pembimbing



Dr. Agus Irfan, S.H.I., M.PI

NIDN



SURAT PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : ALDO ANDRIAN
Nomor Induk : 32501700004
Judul Skripsi : STUDI KOMPARATIF KONSEP KEPEMIMPINAN IBN KHALDUN &
IMAM AL-MAWARDI

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Sejarah Peradaban Islam Jurusan Adab
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jumat, 04 Muharram 1443 H.
13 Agustus 2021 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)

Mengetahui
Dewan Sidang



Drs. Muntaz Arifin Sholeh, M. Lib

Penguji I

Dr. Muna Yastuti Madrah, ST., MA

Pembimbing I

Dr. Agus Irfah, S.HL., M.PI

Sekretaris

Mohammad Noviani Ardi, MIRKH

Penguji II

Dr. Ahmad Mujib, MA

Pembimbing II

Choeroni, S.HI., M.Ag., M.Pd.I

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

Nama : Aldo Andrian

NIM : 3150170004

Jurusan : Sejarah Peradaban Islam

Prodi : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Agama Islam

Dengan sungguh – sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Jika ternyata dikemudian hari skripsi ini terbukti bukan hasil karya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar keserjanaan yang diperoleh

Semarang 20 Desember 2021



Aldo Andrian

MOTTO

اجْهَدْ وَلَا تَكْسَلْ وَلَا تَكُ غَافِلًا # فَنَدَامَةُ الْعُقْبَى لِمَنْ يَتَّكِسَلُ

Bersungguh-sungguhlah dan jangan malas dan jangan jadi lalai, karena penyesalan mendalam itu adalah milik mereka yang bermalas-malasan



ABSTRAK

Nama ; Aldo Andrian

Judul ; Studi Komparatif Konsep Kepemimpinan Ibn Khaldun dan Imam Al-Mawardi

Politik merupakan kajian yang sudah berumur mungkin seusia dengan umur manusia itu sendiri, makanya tidak heran ketika banyak pihak yang memberikan perhatian dan mendalami ilmu politik tersebut, kemudian sejak dahulu masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik, mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber alam, atau perlu dicari satu cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan puas.

Untuk memahami perkembangan konsep kepemimpinan sebelum Islam. Untuk mengetahui biografi Ibn Khaldun dan Imam Al-Mawardi. Untuk mengetahui konsep kepemimpinan Islam Ibn Khaldun dan Imam Al-Mawardi.

Metode Heuristik, Metode Kritik Sumber, dan Metode Historiografi.

Kepemimpinan biasanya diartikan sebagai kekuatan untuk menggerakkan orang dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan hanyalah sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara suka rela. Berkaitan dengan kesediaan orang lain mengikuti keinginan pemimpin, di sini dikemukakan ada beberapa kekuatan (kekuasaan) yang mesti dimiliki pemimpin itu agar orang yang digerakkan tersebut mengikuti keinginannya, yaitu berupa ancaman, penghargaan, otoritas, dan bujukan.

seorang pemimpin menurut Ibn Khaldun adalah seseorang yang menganggap kekuasaannya sebagai amanah dari Allah, sehingga pelaksanaan kekuasaannya dianggap tidak lain sebagai cara terbaik pengabdian kepada Tuhan. Al-Mawardi mengharuskan seorang pemimpin harus seorang mujtahid, maka tidak dibenarkan mengangkat menjadi pemimpin orang yang bukan mujtahid. Dengan alasan karena pemimpin akan menghadapi persoalan-persoalan yang timbul saat memimpin.

DAFTAR ISI

DEKLARASI.....	1
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	2
SURAT PENGESAHAN	4
KATA PENGANTAR.....	10
BAB I.....	13
PENDAHULUAN	13
A. Latar Belakang.....	13
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan dan Kegunaan	17
D. Kajian Pustaka	17
E. Kerangka Teoritik	19
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penelitian Skripsi	23
BAB II.....	25
KONSEP KEPEMIMPINAN PRA ISLAM	25
A. Pengertian Kepemimpinan.....	25
1. Jenis-Jenis Kepemimpinan.....	27
2. Fungsi Kepemimpinan	28
3. Model-Model Kepemimpinan.....	30
B. Konsep Kepemimpinan dalam Peradaban Yunani	31
BAB III.....	37
BIOGRAFI IBN KHALDUN DAN IMAM AL-MAWARDI.....	37
A. Biografi Ibn Khaldun.	37
1. Karya-karya.....	40
2. Kondisi Politik Masa Ibnu Khaldun.....	41
B. Biografi Imam Al-Mawardi	44
1. Riwayat Pendidikan	46
2. Kondisi Politik Imam Al-Mawardi	48
BAB IV	52
KOMPARASI KEPEMIMPINAN MENURUT.....	52

IBN KHALDUN DAN IMAM AL-MAWARDI.....	52
A. Konsep Kepemimpinan Ibn Khaldun	52
1. Pengertian Pemimpin	52
2. Corak kepemimpinan	53
B. Konsep Kepemimpinan Al-Mawardi	57
1. Pengertian Kepemimpinan	57
2. Tugas Pemimpin	59
3. Hak Pemimpin	60
C. Analisis Komparatif pendapat Ibn Khaldun & Imam Al-Mawardi	61
BAB V	65
PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan karunia-Nya sehingga masih diberikan kenikmatan dan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Studi Komparatif Konsep Kepemimpinan Ibn Khaldun dan Imam Al-Mawardi”.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. semoga kelak kita mendapatkan syafa’atnya pada hari kiamat.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak hambatan, rintangan dan ujian yang dihadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual.

Penulis memberikan penghormatan kepada semua pihak yang telah memberikan semangat, bantuan dan dorongan skripsi ini pada akhirnya dapat tersusun. Dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak ibuku terkasih, Alm M. Ja’far dan ibu Kartinem, sampai saya berada di titik ini, sudah tidak terkira lagi hitung-hitungannya.
2. Bapak Drs. Bedjo Santoso, MT., P.hD., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Noviani Ardi. MIRKH selaku Kepala Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Agus Irfan, S.H.I., M.PIselaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
7. Kawan-kawan dekatku Spi 8 (Gemilang), PPI Perjuangan dan Keluarga Tarbiyah 2016, yang telah senantiasa memberi support system sampai saya berada pada titik ini.
8. Kawan-kawan organisasiku; BLM FAI, PMII Komisariat Sultan Agung dan teman seperjuangan Marbot Mesjid Jami Al-Ikhlas Genuk Indah yang telah memberikan saya kesempatan untuk berproses untuk menimba ilmu dan pengalaman.
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan mori maupun materiil demi terselesainya skripsi ini.
10. Dan yang terakhir, terima kasih untuk diri sendiri yang masih bertahan sampai titik ini untuk menjaga nilai-nilai kehidupan yang yang diyakini.

Dengan ketulusannya dalam membantu penulis, tidak ada yang dapat penulis berikan kecuali do'a, semoga selalu mendapatkan keberkahan, dan kemudahan oleh Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna seperti yang diharapkan, oleh karenanya kritik dan saran senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaannya. Penulis memiliki harapan semoga adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat, bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 11 Agustus 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters 'A' and 'A' with a horizontal line through them.

Aldo Andrian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik merupakan kajian yang sudah berumur mungkin seusia dengan umur manusia itu sendiri, makanya tidak heran ketika banyak pihak yang memberikan perhatian dan mendalami ilmu politik tersebut, kemudian sejak dahulu masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik, mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber alam, atau perlu dicari satu cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan puas.¹ Usaha itu dapat dicapai dengan berbagai cara, yang kadang-kadang bertentangan antara satu dengan lainnya, akan tetapi tujuan itu dapat dicapai jika memiliki kekuasaan suatu wilayah tertentu (negara atau sistem politik).

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima dengan baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan yang harmonis. Usaha menggapai kehidupan yang baik ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Masyarakat mengambil keputusan apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan.²

Islam sebagai agama menuntun manusia ke jalan yang benar baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat bahkan negara. Islam bukan sekedar ajaran spiritual melainkan juga memberi petunjuk yang fundamental tentang bagaimana hubungan manusia dengan masyarakat bahkan dengan negara. Sehubungan dengan itu, di kalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. Pertama, berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata

¹Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 13.

²Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 13-15.

agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara.³

Definisi politik dari sudut pandang Islam ialah sebuah pengaturan yang berurusan(kepentingan) umat, baik dalam negeri maupun luar dengan berdasarkan hukum Islam. Berbeda dengan Barat mendefinisikan politik diartikan sebatas pengatasan kekuasaan, bahkan kekuasaan bisa menjadi prioritas dalam berpolitik sehingga mengakibatkan kekacuan dan malah menjadi perebutan kekuasaan.⁴

Jika sistem politik telah didefinisikan dan diketahui dengan utuh, para politikus dan pemikir di negara-negara pada saat ini dapat memberikan subangsih mereka berdasarkan pedoman dan konsep politik yang diberikan oleh masyarakat. Itu merupakan dasar yang kuat dan konsep yang cemerlang, yang menjamin kelanggengan negara, kemajuan masyarakat, perwujudan keadilan, dan kemenangan nilai-nilai yang baik atau menciptakan suatu sistem umum yang mengikat antar bangsa-bangsa dan negara-negara itu untuk mewujudkan kerja sama dalam mencapai program-program yang mulia dan kepentingan bersama, serta menyatukan energi untuk menjaga masyarakat dan negara-negara Islam dari serangan musuh-musuh dari luar.⁵

Kepemimpinan sebenarnya merupakan keharusan perwujudannya dan memiliki aturan-aturan yang khasanah. Namun dalam fakta sejarah tidak sedikit pemimpin yang menghalalkan segala cara dalam meraih kursi kepemimpinannya. Dunia politik penuh dengan intrik-intrik kotor guna memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Bertemunya berbagai kepentingan antar golongan, kelompok dan parpol dalam kalangan elit politik adalah sebuah keniscayaan akan terjadinya konflik bila tidak adanya kesefahaman bersama, dan tidak jarang

³ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan pemikiran*, UI Press, (Jakarta, 1993), hlm. 2

⁴ Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*, Galang Press, (Yogyakarta), hlm 33.

⁵ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Gema Insani Press, (Jakarta, 2001). hlm. 16

berujung pada penyelesaian dengan jalan kekerasan. Rambu-rambu moral memang sering disebut-sebut sebagai acuan dalam berpolitik secara manusiawi dan beradab. Tetapi hal itu hanya menjadi bagian dari retorika politik

Ibn Khaldun dan Al-Mawardi mereka adalah tokoh intelektual muslim yang mendominasi dalam ranah politik mereka memiliki kontribusi besar dalam berpolitik, tujuan mereka sama yakni memperjuangkan eksistensi Negara supaya maju dan bermatahat terutama Islam sebagai subjektifitas sebagai dasar bernegara. Walaupun mereka tidak memiliki kesamaan dalam proses berproses dalam berpolitik.

Ibn termasuk salah satu pemikir Islam yang paling banyak disoroti oleh para akademisi Barat. Mereka sangat terkesima dengan kejeniusan Ibnu Khaldun yang mampu menciptakan pemikiran kreatif disaat budaya ilmiah telah melapuk dalam peradaban Islam. Mereka menganggap bahwa pemikiran Ibnu Khaldun adalah pemikiran progresif terakhir dalam dinamika pemikiran Arab Islam.⁶

Ibn Khaldun menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan adalah keseharusan. Kodrat manusia tidak dapat dipenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Ia membutuhkan orang lain untuk memenuhinya. Maka Ibn Khaldun organisasi masyarakat merupakan suatu keharusan bagi manusia. Ketika manusia telah mencapai organisasi masyarakat dan peradaban, In Khaldun melihat bahwa manusia juga memiliki watak yang suka menyerang antara satu dengan yang lainnya.⁷

Menurut Ibn Khaldun terbentuknya sebuah Negara menjadi penting bagi setiap masyarakat. Karena salah satu tugas Negara ialah mensejahterakan rakyat, maka untuk bisa melahirkan sebuah Negara yang utuh diperlukan persaan persatuan, solidaritas dan nasionalisme yang kuat

⁶ Subkhan Anshori, *Filsafat Islam Antara Ilmu dan Kepentingan* (Surabaya: Pustaka Azhar, 2011), 202

⁷ Ibn Khaldun, Muqaddimah, *Dar Al-Kitab Al-arabi*, (Bierut, 2001), hlm 33-34.

antar sesama inilah yang dimaknai oleh Ibn Khaldun dengan konsep Ashabiyah(solidaritas golongan).⁸

Menurut Ibn Khaldun memimpin harus mempunyai sifat solidaritas yang kuat. Tanpa solidaritas maka seorang pemimpin akan sulit memperoleh legitimasi dan tidak akan dapat bertahan memimpin kelompok tersebut. Karena itu kuat dan lemahnya suatu Negara tergantung pada sebuah solidaritas kelompok.⁹

Al-Mawardi adalah salah satu tokoh pemikir politik Muslim yang menarik untuk dibahas. Khususnya tentang asal mula tentang timbulnya negara dan sistem pemerintahan hampir semua tokoh pemikir politik Muslim klasik dan pertengahan. Namun yang unik dari Al-Mawardi adalah teori tentang kontrak sosial, yang tidak dimiliki oleh pemikir Islam sebelumnya atau sezaman dengannya. Bahkan teori ini baru lima abad kemudian diperkenalkan oleh pemikir-pemikir Barat.¹⁰

Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara merupakan instrument untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan merupakan dua jenis aktifitas yang berbeda, tetapi berhubungan secara simbolik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian.¹¹

Berangkat dari latar belakang ini sangat menarik untuk dikaji lebih jauh dan mendalam lagi, bagaimana sebenarnya konsep kepemimpinan antara Ibn Khaldun dan Imam Al-Mawardimengenai sistem politik dalam segi kepemimpinanandemi menciptakan pemimpin yang adil dan bijaksana dalam memimpin sebuah negara.

⁸ Muh Sofiuiddin, *Pandangan Ibn Khaldun Tentang Manusia dan Masyarakat*, (Yogyakarta, UGM Press), hlm vii

⁹ Ibn Khaldun, Muqaddimah, *Dar Al-Kitab Al-arabi*, (Bierut, 2001), hlm 154.

¹⁰Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. (Jakarta: UI Press, 1993), h. 69.

¹¹ 13Syamsuddin Ramadhan, *Menegakkan Kembali Khilafah Islamiyah*, (Jakarta: Panjimas), 2003, h. 45.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan konsep kepemimpinan sebelum Islam?
2. Bagaimana biografi Ibn Khaldun dan Imam Al-Mawardi?
3. Bagaimana konsep kepemimpinan Ibn Khaldun dan Al-Mawardi?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a) Untuk memahami perkembangan konsep kepemimpinan sebelum Islam.
- b) Untuk mengetahui biografi Ibn Khaldun dan Imam Al-Mawardi.
- c) Untuk mengetahui konsep kepemimpinan Islam Ibn Khaldun dan Imam Al-Mawardi

2. Adapun kegunaan yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai:

- a) Untuk merefleksi kembali khazanah keilmuan Islam yang menjadi konsep dasar oleh para tokoh muslim terhadap perkembangan politik Islam pada zamannya.
- b) Untuk mengembangkan wawasan keilmuan yang terkait erat dengan peristiwa-peristiwa sejarah, sehingga berguna menjadi bahan referensi terutama sejarah politik Islam
- c) Untuk memberikan kontribusi pemikiran secara teoritik bagi akademisi utamanya mengkaji sebuah pemikiran politik Islam dalam sejarah peradaban Islam.

D. Kajian Pustaka

Ibn Khaldun dan Imam Al-Mawardi menjadi kajian fokus penulis. Diantaranya membahas sejarah perkembangan politik, biografi dan pemikiran.

Diantaranya penelitian dilakukan oleh Alba Roma Triwijaya dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Perbandingan Corak pemikiran Etika Politik Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun*. Beliau mengatakan bahwa etika politik Keduanya memiliki sifat pemikiran yang berbeda antara satu

dengan yang lainnya. Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai etika politik bersifat lebih terbuka untuk urusan duniawi, namun tetap tegas dalam urusan agama dan akhirat. Keterbukaan Ibnu Taimiyah terhadap urusan dunia terlihat dari pemikirannya yang tidak terlalu detail dalam menyinggung masalah bentuk negara, tidak menyebut dengan detail mengenai cara pengangkatan pemimpin, serta asal dari pemimpin tidak perlu dari kaum Quraisy.¹²

Kemudian penelitian oleh Muhliadi skripsinya berjudul “*Kekuasaan dan legitimasi menurut Ibn Khaldun*” ia memaparkan bahwa Legitimasi ashabiyah merupakan pengakuan yang diberikan atas dasar solidaritas terhadap sebuah kedaulatan. Sebagaimana Ibn Khaldun mengatakan dalam Muqaddimah bahwa tujuan terakhir solidaritas sosial adalah kedaulatan sebabnya karena solidaritas sosial itulah yang menyatukan usaha untuk tujuan yang sama, mempertahankan diri, menolak, atau mengalahkan musuh.¹³

Pembuatan journal oleh Rashda Diana berjudul Etika POLitik Dalam Perspektif Al-Mawardi”. Etika politik al-Mawardi bersandarkan pada al-Qur’an dan al-Sunnah terlepas dari kondisi masyarakat yang dihadapi. Dalam konsepetiknya, al-Mawardi selalu menekankan keharusan seorang penguasa untuk selalu patuh dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral yang sudah dijelaskan dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Hal tersebut mencakup kemampuan pribadi pemimpin (penguasa), kejujuran, keadilan, penyampaian amanat pada haknya, apresiasi terhadap keilmuan, dan membela kepentingan rakyat (yang teraniaya) di atas kepentingan pribadi serta golongan¹⁴

¹² Alba Roma Triwijaya, “Analisis Perbandingan Corak pemikiran Etika Politik Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun”, Skripsi Hukum, Perpustakaan UIN Raden Intang Lampung, 2018, hlm 85

¹³ Mulhadi, “*Kekuasaan dan Legitimasi Politik Menurut Ibn Khaldun*” Skripsi Pemikiran Politik Islam, Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, 2013, hlm 59

¹⁴ Rashda Diana, “*Etika Politik dalam Perspektif Al-Mawardi*” journal Peradaban Islam, Unida Gontor.

Biografi Ibn Khaldun kehidupan dan Karya Bapak sosiologi Dunia, karya Muhammad Abdullah Enan, terbit pada tahun 2013. Didalamnya memuat biografi Ibn Khaldun itu sendiri, kehidupan beliau sejak kecil hingga menjadi seorang hakim sebanyak lima kali dengan berbeda kepemimpinan di berbagai kota-kota besar wilayah Timur. Hal ini menjadi bahan refleksi dalam mengawal penelitian ini karena kesamaan topik tentang biografi Ibn Khaldun selama hidupnya maka bisa digunakan sebagai basis struktur membangun logika berfikir yang sama.

Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer, karya DR. Muhammad Iqbal, DRS. H. Amin. Husein Nasution, terbit pada tahun 2010. Didalamnya memuat para pemikir muslim dalam bidang politik mereka memiliki corak fikir dan cara berpolitik yang berbeda terhadap perubahan dan keutuhan Negara, terkhusus didalamnya terdapat tokoh Ibn Khaldun dan Imam Al-Mawardi kedua tokoh ini menjadi dasar refleksi penulis untuk dijadikan bahan referensi dan membangun logika berfikir.

Penulis skripsi kali ini berbeda dengan skripsi atau jurnal sebelumnya ada satu judul yang hampir menyerupai seperti ini tetapi hanya dalam bentuk blogspot belum ada dalam skripsi maupun jurnal, maka dari itu peneliti ingin mengkomparasikan pemikiran politik Islam Ibn Khaldun dan Al-Mawardi yang mana keduanya sama-sama memiliki tujuan yang sama tetapi memiliki corak pemikiran yang berbeda dan memiliki sosial politik yang berbeda pula.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini adalah penelitian sejarah dengan menggunakan pendekatan historis dan komparatif. Pendekatan historis bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensintesis bukti-bukti untuk menegakan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Pendekatan historis digunakan dalam memahami dan mendeskripsikan hingga menjelaskan peristiwa masa lampau Ibn Khaldun dan Al-Mawardi

yang meliputi biografi, kehidupan sosial, serta latar belakang pengembangan konsep kepemimpinan.

Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan dua gejala atau lebih. Penelitian komparatif dapat berupa komparatif deskriptif (*descriptive comparative*) maupun komparatif korelasional (*correlation comparative*). Komparatif deskriptif membandingkan variabel yang sama untuk sampel yang berbeda. Menurut Suharsimi Arikunto, dalam penelitian komparasi dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, prosedur kerja, ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara, terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.¹⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, karena meneliti peristiwa masa lampau. Menurut Gilbert Garraghan, metode penelitian sejarah merupakan serangkaian system dan prinsip untuk membantu dalam upaya mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, kritisme adalah mata pisau untuk menguji atau menilai sumber-sumber sejarah.¹⁶ Dalam penelitian sejarah, tahapan metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Heuristik

Heuristik berasal dari kata *Heurikein* yang berarti memperoleh atau menemukan. Heuristik disini merupakan kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau yang dikenal sebagai data-data sejarah. Dalam melakukan kegiatan menghimpun jejak atau data-data sejarah.

¹⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 236

¹⁶Dudung Abdurrahman, *metode penelitian sejarah*, (Jakarta, Logos wacana Ilmu), 1999, hlm 103

Sumber Sejarah menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dan sekunder yang digunakan dalam penulisan ini berupa buku-buku, dokumen dimana buku tersebut ditulis oleh orang yang menyaksikan peristiwa tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan.

1. Sumber primer adalah kesaksian dari seseorang saksi dengan mata kepala sendiri. Selain itu juga kesaksian menggunakan panca indera yang lain atau juga saksi dengan alat mekanis yang selanjutnya disebut saksi pandang mata. Arti lain sumber primer adalah sumber yang disampaikan oleh saksi mata. Disini penulis menggunakan sumber primer yaitu :

Ibnu Kalhdun. (1982). *Muqoddimah Ibnu Khaldun* (Suatu Pendahuluan). Jakarta: Faizan.

Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyyah*.

2. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data Sumber-sumber Sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Sumber sekunder ini sungguh kaya dan siap sedia menunggu penggunaanya oleh peneliti yang memerlukannya.¹⁷

Sumber sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Ali Abdulwahid. (1985). *Ibnu Khaldun Riwayat dan Karyanya*. Jakarta: Grafitipres.

¹⁷Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta, 2010), hlm 210.

Fuad Bali dan Ali Wafi. (1989). *Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Rahman Zainuddin. (1992). *Kekuasaan dan Negara (Pemikiran Politik Ibnu Khaldun)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Muhammad Iqbal dan H. amin. Husein Nasution. (2013). *Pemikiran Politik Islam Dari Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana

Muhammad Abdullah Enan (2013). *Biografi Ibn Khaldun Kehidupan dan Karya Bapak Sosiologi Dunia*. Jakarta: Zaman.

Maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sumber sekunder yaitu merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁸

Dengan demikian bahwa heuristic adalah upaya penelitian mendalam untuk menghimpun jejak sejarah atau mengumpulkan dokumen-dokumen agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian-kejadian bersejarah di masa lampau.

2. Metode Kritik Sumber.

Setelah pengumpulan sumber-sumber yang berkaitan dengan topic, maka tahap selanjutnya ialah verifikasi data atau kritik sumber, kritik sumber ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

a) Kritik ekstren

Kritik ekstren adalah penelitian melakukan pegujian atas asli tidaknya sumber, berarti ia menyeleksi segi-segi fisik sumber yang ditemukan. Bila sumber itu merupakan

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, 2011), hlm 224

dokumen, maka peneliti harus meneliti dari segi tulisan, bahasanya dan ungkapannya.

b) Kritik intren

Kritik intren adalah penentuan dapat tidaknya keterangan dalam dokumen digunakan sebagai fakta sejarah. Biasanya dicari adalah keterangan-keterangan yang benar. Implementasi tahanan ini penulis membandingkan isi buku tentang hal yang sama tetapi terdapat perbedaan keterangan.

Tujuan utama kritik sumber ialah untuk menyeleksi data, sehingga di peroleh data.

3. Metode Interpretasi

Interpretasi adalah menetapkan makna dan saling berhubungan antara fakta-fakta yang diperoleh. Interpretasi diperlukan agar data yang mati bisa mempunyai arti kembali. Suatu peristiwa sejarah bisa dikaji ulang oleh orang lain. Penafsiran yang berlainan tentang fakta-fakta sejarah mungkin saja terjadi, tergantung dari sudut pandang mana seseorang melihat peristiwa.

4. Metode Historiografi

Historiografi merupakan penulisan sejarah, pemaparan dari hasil penelitian dan interpretasi dengan memperhatikan cara membuat urutan peristiwa, urutan waktu, dan kronologi, berkut memberikan deskripsi dan ilustrasi mulai dari perencanaan di awal hingga tahap akhir atau kesimpulan.¹⁹

G. Sistematika Penelitian Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi. Ada tiga bagian yang termuat dalam skripsi ini, yaitu bagian muka, bagian isi, dan bagian pelengkap.

1. Bagian Muka

¹⁹Dudung Abdurrahman, *metode penelitian sejarah*, (Jakarta, Logos wacana Ilmu), 1999, hlm 78

Bagian muka terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari lima bab yaitu :

BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang, Batasan dan Perumusan Masalah, Tujuan, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika.

BAB II : Perkembangan Konsep Kepemimpinan sebelum Islam

BAB III : Biografi Ibn Khaldun dan Imam Al-Mawardi

BAB IV : KonsepKepemimpinan Islam Ibn Khaldun dan Al-Mawardi

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

3. Bagian Pelengkap

Pada bagian ini terdiri dari: Daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

KONSEP KEPEMIMPINAN PRA ISLAM

A. Pengertian Kepemimpinan

Pemimpin pada hakikatnya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan.

Menurut Stone, semakin banyak jumlah sumber kekuasaan yang tersedia bagi pemimpin, akan makin besar potensi kepemimpinan yang efektif. Jenis pemimpin ini bermacam-macam, ada pemimpin formal, yaitu yang terjadi karena pemimpin bersandar pada wewenang formal. Ada pula pemimpin nonformal, yaitu terjadi karena pemimpin tanpa wewenang formal berhasil mempengaruhi perilaku orang lain.²⁰

Kepemimpinan biasanya diartikan sebagai kekuatan untuk menggerakkan orang dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan hanyalah sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela. Berkaitan dengan kesediaan orang lain mengikuti keinginan pemimpin, di sini dikemukakan ada beberapa kekuatan (kekuasaan) yang mesti dimiliki pemimpin itu agar orang yang digerakkan tersebut mengikuti keinginannya, yaitu berupa ancaman, penghargaan, otoritas, dan bujukan.²¹

Pengertian lain menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses menghargai orang lain untuk memahami dan menyepakati tentang apa yang perlu untuk dilakukan dan bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan secara efektif,

²⁰ Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013, h. 88.

²¹ Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah; Teori, Model, dan Aplikasi*, Jakarta: Grasindo, 2003, h. 153

dan proses memfasilitasi usaha individu atau kelompok (kolektif) untuk memenuhi tujuan-tujuan utama.²²

Banyaknya konsep definisi kepemimpinan yang berbeda hampir sebanyak jumlah orang yang telah berusaha untuk mendefinisikannya. Untuk lebih mempermudah pemahaman kita, maka akan diambil satu definisi yang kiranya mampu menjadi landasan untuk membahas konsep kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya

Kepemimpinan memiliki beberapa implikasi, antara lain :

- a. Kepemimpinan berarti melibatkan orang atau pihak lain, yaitu para karyawan atau bawahan (followers). Para karyawan atau bawahan harus memiliki kemauan untuk menerima arahan dari pemimpin. Walaupun demikian, tanpa adanya karyawan, tidak akan ada pemimpin.
- b. Seorang pemimpin yang efektif adalah seseorang yang dengan kekuasaannya (his or her power) mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Para pemimpin dapat menggunakan bentuk-bentuk kekuasaan atau kekuatan yang berbeda untuk mempengaruhi perilaku bawahan dalam berbagai situasi.
- c. Kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri (integrity), sikap bertanggung jawab yang tulus (compassion), pengetahuan (cognizance), keberanian bertindak dengan keyakinan (commitment), kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain (confidence) dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain (communication) dalam membangun organisasi²³

Seorang pemimpin terutama harus mempunyai fungsi sebagai penggerak atau dinamisator dan koordinator dari sumber daya manusia, sumber daya alam, semua dana dan sarana yang disiapkan oleh sekumpulan manusia yang berorganisasi untuk mencapai sebuah tujuan.

²² Gary, A. Yulk, *Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Diterjemah Oleh Jusuf Udaya, Jakarta: Prenhallindo, 1997, h. 7.

²³ Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 105.

Kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut Leadership dan dalam bahasa Arab disebut *Zi'amah* atau Imamah. Dalam terminologi yang dikemukakan oleh Marifield dan Hamzah. Kepemimpinan adalah menyangkut dalam menstimulasi, memobilisasi, mengarahkan, mengkoordinasi motif-motif dan kesetiaan orang-orang yang terlibat dalam usaha bersama.

Kata pemimpin dan kepemimpinan merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan baik secara struktur maupun fungsinya. Maka keduanya saling berkaitan satu sama lain dan saling melekat dalam kehidupan bersosial.

1. Jenis-Jenis Kepemimpinan

- a. Kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin menfokuskan perhatiannya pada transaksi interpersonal antara pemimpin dengan karyawan yang melibatkan hubungan pertukaran. Pertukaran tersebut didasarkan Kepemimpinan Transformasional

Istilah kepemimpinan transformatif berasal dari dua kata, yaitu kepemimpinan atau leadership dan transformatif atau transformasional. Istilah transformatif berinduk kepada kata *to transform*, yang bermakna mentransformatifkan atau mengubah sesuatu menjadi bentuk lain yang berbeda.²⁴

- b. Kepemimpinan transformasional merupakan sebuah proses dimana pemimpin mengambil tindakan-tindakan untuk meningkatkan kesadaran rekan kerja mereka tentang apa yang penting, untuk meningkatkan kematangan motivasi rekan kerja mereka serta mendorong mereka untuk melampaui minat pribadi mereka demi mencapai kemaslahatan kelompok, organisasi, atau masyarakat²⁵

Model kepemimpinan transformasional pada hakekatnya menekankan seorang pemimpin perlu memotivasi para bawahannya untuk melakukan tanggungjawab mereka lebih dari yang mereka harapkan. Pemimpin transformasional harus mampu mendefinisikan,

²⁴ Kurniadi, *Manajemen Pendidikan, Konsep dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan*, Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2012, h. 316

²⁵ Raihan, *Kepemimpinan Sekolah Transformasional*, Yojakarta: PT. LKS Printing Cemerlang. h.

mengkomunikasikan dan mengartikulasikan visi organisasi, dan bawahan harus menerima dan mengakui kredibilitas pemimpinnya.

Dengan demikian, pemimpin transformasional merupakan pemimpin yang karismatik dan mempunyai peran sentral dan strategis dalam membawa organisasi mencapai tujuannya. Pemimpin transformasional juga harus mempunyai kemampuan untuk menyamakan visi masa depan dengan bawahannya, serta mempertinggi kebutuhan bawahan pada tingkat yang lebih tinggi dari pada apa yang mereka butuhkan.

Pada kesepakatan mengenai klasifikasi sasaran, standar kerja, penugasan kerja, dan penghargaan. Kepemimpinan transaksional didasarkan pada otoritas birokrasi dan legitimasi di dalam organisasi. Pemimpin transaksional pada hakekatnya menekankan bahwa seorang pemimpin perlu menentukan apa yang perlu dilakukan para bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi.

Kepemimpinan transaksional ini cenderung memfokuskan diri pada penyelesaian tugas-tugas organisasi, pemimpin transaksional pada hakekatnya menekankan bahwa seorang pemimpin perlu menentukan apa yang perlu dilakukan para bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Disamping itu, pemimpin transaksional cenderung memfokuskan diri pada penyelesaian tugastugas organisasi. Untuk memotivasi agar bawahan melakukan tanggungjawab mereka, para pemimpin transaksional sangat mengandalkan pada sistem pemberian penghargaan dan hukuman

2. Fungsi Kepemimpinan

Tujuan dan fungsi seorang pemimpin, akan sangat menentukan kemana dan akan menjadi apa organisasi yang dipimpinnya. Sehingga dengan kehadiran seseorang pemimpin akan membuat organisasi menjadi satu kesatuan yang memiliki kekuatan untuk berkembang dan tumbuh menjadi lebih besar.²⁶

²⁶Wahyudi, *Pengembangan Pendidikan Strategi Inovatif & Kreatif dalam Mengelola Pendidikan Secara Komprehensif*, Jakarta: PT Prestasi Pustakarya, 2012, h.15.

Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam lima pokok kepemimpinan sebagai berikut:²⁷

- a. Fungsi Intruksional Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah pemimpin sebagai komunikasi pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah.
- b. Fungsi Konsultasi Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik (feed back) untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.
- c. Fungsi Partisipatif Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya.
- d. Fungsi Delegasi Fungsi ini dilaksanakan dengan memberi pelimpahan wewenang membuat/menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi.
- e. Fungsi Pengendalian Fungsi pengendalian bermaksud kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktifitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan pusat sumber belajar melalui pengembangan pusat belajar.

²⁷*Ibid* h 16

3. Model-Model Kepemimpinan

Para ahli persoalan kepemimpinan menyimpulkan bahwa perilaku pemimpin ketika mempengaruhi anggotanya terhadap pelaksanaan kerjanya dan kriteria-kriteria lain sangat dipengaruhi oleh situasi yang tidak tetap. Pentingnya situasi telah banyak diakui oleh para ahli sangat memberikan pengaruh yang berarti terhadap gaya kepemimpinan yang ditampilkan seorang pemimpin pada saat mempengaruhi anggotanya.

Beberapa model kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Model Kepemimpinan Otokratik.

Model kepemimpinan otokratik merupakan model kepemimpinan yang paling tua yang dikenal manusia. Dalam model kepemimpinan ini, pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Orang-orang yang dipimpin yang jumlahnya lebih banyak merupakan pihak yang dikuasai yang disebut bawahan atau anak buah. Pemimpin memandang dirinya lebih dalam segala hal dibandingkan bawahannya.²⁸

b. Model Kepemimpinan Demokratis

Model kepemimpinan ini diarahkan untuk bekerja mencapai tujuan bersama. Semua keputusan diambil melalui musyawarah dan mufakat serta harus ditaati. Pemimpin menghormati dan menghargai pendapat bawahan dan memberi kesempatan untuk mengembangkan inisiatif dan daya kreatif.

Pemimpin mendorong bawahannya dalam mengembangkan keterampilannya. Model kepemimpinan ini, bawahannya bekerja dengan suka cita untuk memajukan organisasinya. Semua pekerjaan dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Akhirnya tercapailah suasana sasana kekeluargaan yang sehat dan menyenangkan.²⁹

²⁸Bedjo Sujanto, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah: Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Sagung Seto, 2009, h. 82

²⁹Helmawati, *Meningkatkan Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah Melalui ManajerialSkil*, h. 47

Dalam model kepemimpinan demokratis ia tidak bertindak diktator sebagaimana model kepemimpinan otoriter, melainkan sebagai pemimpin di tengah-tengah bawahan dan anggota-anggotanya. Ia tidak menempatikandirinya sebagai majikan sedangkan bawahannya sebagai buruh, melainkan sebagai saudara tua di antara teman-temannya.³⁰

B. Konsep Kepemimpinan dalam Peradaban Yunani

Aristoteles merupakan murid Plato, tetapi pemikiran filsafatnya tentang negara itu berbeda, dimana bila Plato filsafatnya ideal, sedangkan Aristoteles menganut filsafat yang realis. Demikian pula uraiannya tentang bentuk negara dan pemerintahan, Plato: filosofis-idealistis, sedangkan Aristoteles: empirisinduktif. Dalam menerangkan tentang bentuk negara dan pemerintahan.

Aristoteles membuat klasifikasi bentuk pemerintahan. Kriteria atau dasar penilaian yang digunakan adalah:

1. Jumlah orang yang berkuasa (duduk dalam pemerintahan).
2. Cara dan kepentingan dalam menjalankan kekuasaan pemerintah.

Mengenai jumlah orang yang berkuasa atau memegang tampuk pemerintahan, terdapat tiga macam pembagian, yaitu pemerintahan oleh satu orang (government by one), pemerintahan oleh sekelompok orang (government by few), dan pemerintahan oleh banyak orang (government by the many).

Masing-masing dari ketiga macam pembagian itu diberi klasifikasi antara bentuk yang baik (positif) dengan bentuk yang buruk (negatif). Sehingga seluruhnya terdapat enam bentuk pemerintahan. Hal baik atau buruknya suatu pemerintahan, ditinjau dari segi cara dan kepentingan dalam menjalankan. Jika pemerintahan itu dijalankan dengan diabdikan untuk kepentingan umum atau

³⁰ Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009, h. 50

masyarakat, maka disebut sebagai bentuk yang baik. Sebaliknya, jika diabdikan untuk kepentingan pribadi atau kelompok maka disebut bentuk yang buruk.

Pemerintahan oleh satu orang jika diabdikan untuk kepentingan umum disebut Monarki, sedangkan jika diabdikan untuk kepentingan pribadi disebut Tirani.

Pemerintahan oleh sekelompok atau beberapa orang, jika mengabdikan untuk kepentingan masyarakat umum disebut Aristokrasi. Sebaliknya disebut Oligarki jika mengabdikan untuk kepentingan kelompok saja. Pemerintahan oleh banyak orang, jika diabdikan untuk kepentingan bersama bagi banyak orang (termasuk yang diwakili aspirasinya, karena tidak langsung duduk dalam pemerintahan) disebut Demokrasi, sedangkan dalam bentuk yang buruk (negatif) dari pemerintahan oleh banyak orang, yaitu jika keikutsertaan banyak orang itu digunakan untuk berkelahi disebut Mobokrasi. Mobokrasi, sebagai bentuk lawan dari demokrasi ini, menurut istilah asli dari Aristoteles disebut “polity”.³¹

Untuk lebih jelasnya mengenai apa yang dimaksud dengan bentuk negara dan Pemerintahan seperti di atas, dibawah ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Monarki Berasal dari kata Yunani monos yang berarti satu dan archein yang berarti memerintah atau menguasai. Oleh karena itu monarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipimpin oleh seseorang yang berusaha mewujudkan kesejahteraan umum. Idealnya menurut Aristoteles, monarki sebagai negara ideal karena dipimpin oleh seorang filosof yang arif dan bijaksana yang kekuasaannya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, Aristoteles menyadari bahwa monarki nyaris tidak mungkin ada dalam realitas, ia hanya refleksi gagasan normatif yang sulit terealisasi dalam dunia empiris.³²
2. Aristokrasi Berasal dari bahasa Yunani aristoi yang berarti kaum bangsawan atau cendekiawan dan kratein yang berarti kekuasaan. Jadi Aristokrasi berarti: bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh beberapa filosof yang berusaha mewujudkan kesejahteraan umum.

³¹ Teuku May Rudy, *Pengantar Ilmu Politik: Wawasan pemikiran dan kegunaannya*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2013), hlm. 31-32

³² Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 46

3. Oligarki Berasal dari kata oligoi yang berarti beberapa dan archien yang berarti pemerintahan. Oligarki berarti bentuk pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang yang mengutamakan kepentingan golongannya sendiri.
4. Demokrasi Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat, dan kratein yang berarti memerintah. Jadi demokrasi berarti pemerintahan yang dipegang oleh rakyat.³³

Kita harus mulai dengan menentukan apakah yang ada hanya satu jenis kerajaan, Jenis kerajaan yang ditentukan di dalam konstitusi Sparta dianggap sebagai contoh terbaik kerajaan yang berada di bawah hukum. Tetapi ia tidak meliputi kedaulatan umum: seorang raja Sparta mempunyai tanggung jawab dalam masalah-masalah militer hanya ketika ia pergi ke luar negeri kemudian urusan religius juga diserahkan kepada raja.

Bentuk kerajaan ini seperti jabatan jenderal dengan komando absolut dan masa jabatan yang permanen. Seorang raja dari jenis ini tidak mempunyai kuasa untuk menghukum mati seseorang, kecuali atas alasan pengecut, seperti yang terjadi pada ekspedisi-ekspedisi militer di zaman kuno, berdasarkan hak kekuasaan yang superior. Ini merupakan satu jenis kerajaan yang berdasarkan komando militer yang dijalankan seumur hidup, sebagian dari jenis ini bersifat turun-temurun dan yang lainnya melalui pemilihan.

Bentuk kerajaan yang lain adalah jenis yang ditemukan di kalangan beberapa masyarakat barbar. Kerajaan dari jenis ini semua memiliki otoritas yang sama dengan tirani; namun, bagaimanapun juga, diatur oleh hukum, dan turuntemurun dari ayah kepada anak. Alasannya ialah bahwa orang-orang barbar ini lebih berwatak budak daripada orang Yunani (seperti orang-orang Asia lebih berwatak budak daripada orang-orang Eropa) dan oleh karena itu, mereka menerima penguasa despotik (penguasa tunggal yang berbuat sekehendak hatinya) tanpa keluhan apapun. Demikianlah kerajaan-kerajaan ini, Karena alasan yang sama para pengawal yang dipakai di dalam kota-kota itu cocok dengan para raja, dan tidak cocok dengan para tiran. Para raja dikawal oleh pasukan-pasukan yang berasal dari rakyatnya dan para tiran dikawal oleh pasukan asing. Dengan memerintah menurut hukum, dan dengan persetujuan para warganya, raja-raja mempunyai para pengawal yang diambil dari rakyatnya dan sang tiran mempunyai pengawal asing untuk melindungi diri juga rakyatnya.

³³ Atmadja, *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*,.hlm. 127-128

Bentuk-bentuk pemerintahan ini di dalam hal, dalam hal kekuasaan despotiknya adalah masih tirani, akan tetapi ia merupakan kerajaan, karena lewat pemilihan dan berdasarkan pada persetujuan warga negaranya. Tetapi ada jenis kerajaan yang keempat, yaitu kerajaan-kerajaan di zaman heroik yang berdasarkan pada persetujuan dan turun-temurun dari ayah ke anak menurut hukum. Para pendiri garis kerajaan adalah para dermawan untuk rakyat mereka di dalam seni atau perang: mereka mengumpulkan rakyat di dalam sebuah kota dan telah mendirikan kerajaan yang akan diwariskan kepada para penerusnya.

Raja-raja tersebut mempunyai fungsi-fungsi yang tertinggi sebagai komandan di dalam peperangan, dan dalam mempersembahkan kurbankurban yang tidak memerlukan seorang pendeta dan mereka juga menjadi hakim dalam tindakan-tindakan hukum. Di zaman kuno mereka menikmati suatu otoritas yang permanen, yang menyangkut orang-orang kota, desa, dan hubungan-hubungan luar negeri. Di masa-masa terakhir, mereka melepaskan beberapa hak prerogatifnya karena hak-hak yang lain diambil oleh massa.

Dengan demikian, ada lima bentuk kerajaan:

1. Kerajaan zaman heroik, yang didasarkan pada persetujuan umum tetapi terbatas pada sejumlah fungsi, dimana sang raja bertindak sebagai jenderal dan hakim juga sebagai pemimpin ibadat-ibadat religius.
2. Kerajaan di kalangan orang-orang barbar, dimana raja menjalankan suatu otoritas despotik, melalui hak turun-temurun, meskipun sesuai dengan hukum.
3. Kerajaan Aisumneteia, ini merupakan suatu bentuk tirani yang berdasarkan pemilihan.
4. Kerajaan Sparta, yang dapat didefinisikan sebagai komando permanen atas angkatan perang yang dijalankan melalui hak turun-temurun.
5. Kerajaan absolut, dimana seorang pribadi tunggal mempunyai kekuasaan tertinggi atas segala sesuatu dan mempunyai jenis kekuasaan yang sama dengan yang dijalankan oleh sebuah suku atau kota terhadap urusan-urusan publiknya.

Plato mendudukan pengetahuan di tempat yang paling mulia, karena ia beranggapan bahwa hanya pengetahuanlah yang sanggup membimbing dan menuntun manusia untuk datang pada pengenalan yang benar akan segala sesuatu yang ada dengan

dan dalam keberadaannya masing-masing. Oleh sebab itu, pengetahuan layak ditempatkan di tempat yang paling utama dan mulia, maka wajarlah apabila pengetahuan itu menjadi sumber kekuasaan. Aristoteles tidak sependapat dengan Plato mengenai sumber kekuasaan, namun itu tidak berarti Aristoteles lalu kembali ke pandangan tradisional yang menempatkan agama atau dewa sebagai sumber kekuasaan, kendati pandangan tradisional itu masih begitu erat digenggam oleh banyak orang pada masa itu. Ia pun tidak sependapat dengan orang-orang tertentu yang menempatkan kekayaan di tempat yang mulia, meski dalam kenyataannya kekayaan sanggup mempengaruhi dan mengatur para penguasa, namun bagi Aristoteles hal itu tidak dapat menjadi alasan untuk menempatkannya sebagai sumber kekuasaan kemudian dia juga tidak setuju untuk menempatkan kedudukan, pangkat, dan jabatan sebagai sumber kekuasaan³⁴

Bagi Aristoteles, masalah yang penting untuk disoroti, yang berhubungan dengan pemegang kekuasaan itu ialah: apa yang dikemukakan oleh Plato dalam buku Republik, yaitu bahwa yang layak menjadi pemegang kekuasaan ialah orang pilihan yang dianggap terbaik dan yang paling unggul di antara semua orang pilihan, yakni orang yang memiliki pengetahuan dan kebajikan yang sempurna.

Namun karena hal itu tidak mungkin dapat dijumpai di muka bumi ini, maka yang penting ialah bukan mencari orang yang terbaik melainkan menyusun hukum yang terbaik, yang tidak hanya harus menjadi sumber kekuasaan tetapi juga sebagai pedoman bagi pemegang kekuasaan itu. Hukum yang merupakan sumber kekuasaan dan pedoman pemerintahan itu harus memiliki kedaulatan dan kewibawaan tertinggi dan karena demikian pentingnya peranan hukum, maka hukum yang menjadi sumber kekuasaan dan pedoman pemerintahan itu haruslah hukum yang benar-benar terbaik.

Menurut Aristoteles, bentuk pemerintahan negara yang terbaik bagi hukum yang terbaik itu adalah politeia, bentuk politeia yang baik ialah yang berada di antara oligarki dan demokrasi, oleh karena itu, menurut Aristoteles, janganlah orang-orang kaya seperti dalam bentuk oligarki yang menjadi pemegang kekuasaan, tetapi juga jangan orang-orang miskin seperti dalam bentuk demokrasi yang menjadi penguasa, tetapi mereka yang berada di antara dua golongan itu, yakni golongan menengah, yang biasa membawa senjata, mereka itulah yang paling tepat menjadi pemegang kekuasaan. Golongan menengah-lah yang dapat menjaga keseimbangan antara golongan kaya dan golongan

³⁴ Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), h. 53-54.

miskin. Aristoteles menegaskan bahwa apabila dalam suatu negara terdapat kelas menengah yang sangat besar, dan mereka juga yang menjadi pemegang kekuasaan dalam negara itu dan takluk pada hukum, maka dapat diharapkan negara itu akan menjadi negara yang sangat kuat dan sanggup bertahan dalam waktu yang lama.

Selain itu, Aristoteles juga yakin akan kebaikan dari kekuasaan yang berada di tangan banyak orang. Bagi Aristoteles, jumlah orang yang begitu besar⁷⁷ akan memperkecil kemungkinan masuknya hal-hal buruk yang dapat membahayakan negara. Sebab, bilamana pemegang kekuasaan itu orang banyak, maka sudah pasti kebijaksanaan kolektif dari sekian banyak orang akan jauh lebih baik daripada kebijaksanaan satu orang atau beberapa orang, kendatipun mereka adalah orang-orang yang pandai³⁵

³⁵*Ibid* h. 55-57

BAB III

BIOGRAFI IBN KHALDUN DAN IMAM AL-MAWARDI

A. Biografi Ibn Khaldun.

Nama lengkap Ibn Khaldun ialah Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Khaldun.³⁶Nasab Ibnu Khaldun digolongkan kepada Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khalid.³⁷

Ibn Khaldun dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara, pada 1 Ramadhan 732 H/27 Mei 1332 M, dan wafat di Kairo pada 25 Ramadhan 808 H/19 Maret 1406 M.5 Beliau wafat dalam usianya yang ke-76 tahun (menurut perhitungan Hijriyah) di Kairo, sebuah desa yang terletak di Sungai Nil, sekitar kota Fusthath, tempat keberadaan madrasah al-Qamhiah dimana sang filsuf, guru, politisi ini berkhidmat. Sampai saat ini, rumah tempat kelahirannya yang terletak di jalan Turbah Bay, Tunisia, masih utuh serta digunakan menjadi pusat sekolah Idarah 'Ulya. Pada pintu masuk sekolah ini terpampang sebuah batu manner berukir nama dan tanggal kelahiran Ibn Khaldun³⁸

Ayah Ibn Khaldun bernama Abu Abdullah Muhammad, yang wafat pada tahun 749 H/1348 M akibat wabah pes yang melanda Afrika Utara dengan meninggalkan lima orang anak. Ketika itu Ibnu Khaldun masih berusia sekitar 18 tahun. Ayahnya ini merupakan seorang yang ahli dalam bahasa dan sastra Arab.

³⁶ Enan, *Biografi Ibnu Khaldun*, terj. Machnun Husein, h 14

³⁷ibn Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Masturi Irham, h 1079.

³⁸ Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat*, h 7

Setelah memutuskan untuk berhenti dalam menggeluti bidang politik, lalu beliau menekuni bidang ilmu pengetahuan dan kesufian sertamendalami ilmu-ilmu agama. Sehingga beliau pun dikenal sebagai orang yang mahir dalam sya'ir sufi dan berbagai bidang keilmuan lainnya³⁹

Pada awal abad ke-13 M, kerajaan Muwahhidun di Andalus hancur. Sebagian besar kota-kota dan pelabuhannya jatuh ke tangan raja Castilia termasuk kota Sevilla (1248 M). Bani Khaldun terpaksa hijrah ke Afrika Utara mengikuti jejak Bani Hafs dan menetap di kota Ceuta, lalu mengangkat Abu Bakar Muhammad, yaitu kakek kedua Ibnu Khaldun untuk mengatur urusan negara mereka di Tunisia, dan mengangkat kakek pertama beliau yaitu Muhammad bin Abu Bakar untuk mengurus urusan Hijabah (kantor urusan kenegaraan) di Bougie. Karena Ibnu Khaldun lahir ditengah-tengah keluarga ilmuwan dan terhormat, maka beliau berhasil menghimpun antara jabatan ilmiah dan pemerintahan.

Masa pendidikan ini dilalui Ibn Khaldun di Tunisia dalam jangka waktu 18 tahun, yaitu antara tahun 1332-1350 M. Ibn Khaldun mengawali pendidikannya dengan membaca dan menghafal al-Qur'an. Seperti kebiasaan yang membudaya pada masanya, pendidikan Ibn Khaldun dimulai pada usia yang dini, dengan pengajaran yang ketat dari guru pertamanya, yaitu orangtuanya sendiri. Kemudian barulah beliau menimba berbagai ilmu dari guru-guru yang terkenal pada masanya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya, mempelajari bahasa Arab dengan sastranya, al-Qur'an dengan tafsirnya, hadis dengan ilmu-ilmunya, ilmu tauhid, fikih, filsafat dan ilmu berhitung⁴⁰

Beberapa gurunya yang berjasa dalam perkembangan intelektualnya, yaitu: Abu 'Abdullah Muhammad ibnu Sa'ad bin Burr al-Anshari dan Abu al-'Abbas Ahmad bin Muhammad al-Bathani dalam ilmu al-Qur'an (qira'at) Abu 'Abdillah bin al-Qushshar dan Abu 'Abdillah Muhammad bin Bahr dalam ilmu gramatika Arab (bahasa Arab), Syamsuddin Muhammad bin Jabir bin Sulthan al-Wadiyasi dan Abu Muhammad bin Abdul Muhaimin bin Abdul Muhaimin al-Hadhramy dalam ilmu hadis, Abu 'Abdillah Muhammad al-Jiyani dan Abu al-Qasim Muhammad al-Qashir dalam ilmu fikih, serta mempelajari kitab al-Muwatta' karya Imam Malik pada Abdullah Muhammad bin Abdussalam.

³⁹*Op.cit*, h 1080

⁴⁰Dahlan Malik, *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, h 31

Sedangkan ilmu-ilmu rasional seperti filsafat, teologi, mantik, ilmu kealaman, matematika, dan astronomi dipelajari dari Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ibrahim al-Abili. Ibnu Khaldun selalu mendapatkan pujian dan kekaguman dari gurugurunya⁴¹

Dari sekian banyak guru-gurunya, Ibn Khaldun menempatkan dua orang gurunya pada tempat yang istimewa dan memberikan apresiasi (penghormatan) yang sangat besar karena keluasan ilmu kedua gurunya ini, yaitu: Pertama, Abu Muhammad bin Abdul Muhaimin bin Abdul Muhaimin al-Hadhramy, yang merupakan imam para ahli hadis dan ilmu nahwu dalam ilmu-ilmu agama di Maroko. Ibn Khaldun sangat menghargai gurunya ini karena keluasan ilmunya dalam bidang hadis, musthalah hadis, sirah, dan ilmu linguistik/bahasa. Darinya beliau pun mempelajari kitab-kitab hadis, seperti al-Kutub al-Sittah dan al-Muwatta’. Kedua, Abu ‘Abdillah Muhammad bin al-Abili, yang banyak memberikannya pelajaran tentang ilmu-ilmu filsafat, meliputi ilmu mantik, biologi, matematika, astronomi, dan juga musik.

Disini dapat dikatakan bahwa jenjang pendidikan yang ketat dengan bimbingan banyak guru dan sejumlah kitab yang pernah dipelajari oleh Ibnu Khaldun menggambarkan keluasan ilmu dan kecerdasan otak beliau yang sangat luar biasa, serta memperlihatkan betapa beliau menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas ilmiah. Hal ini juga menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun adalah orang yang memiliki ambisi tinggi, yang tidak puas dengan satu disiplin ilmu saja. Pengetahuannya begitu luas dan bervariasi.

Akhirnya pada tahun 1354 M, Ibn Khaldun ikut serta hijrah mengikuti sebagian besar ulama dan sastrawan yang selamat dari wabah penyakit tersebut dan telah lebih dulu hijrah menuju Fez di Maroko pada tahun 1349 M. Selanjutnya beliau kembali memulai studinya kepada para ulama yang ada di Maroko. Adapun gurunya di Maroko adalah Muhammad bin al-Saffar, Muhammad bin Muhammad al-Maqqari, Muhammad bin Ahmad al-‘Alawi, Muhammad bin Abdul Salam, Muhammad bin Abdul Razaq, Muhammad bin Yahya al-Barji, Ibnu al-Khatib, Ibrahim bin Zarrar, dan Abdul Barakat Muhammad al-Ballafiqi.

⁴¹*Op.cith* 1081-1082

Pada masa pendidikannya di Maroko, Ibn Khaldun terlibat aktif dalam kegiatan ilmiah. Banyak buku dan karya-karya ilmiah yang beliau hasilkan, namun karya-karya tersebut umumnya sangat sulit dilacak karena tidak dijelaskan dalam Muqaddimah dan hanya terdiri dari buku-buku kecil saja. Apalagi karya-karya kecil yang dihasilkan tersebut dinilai kurang ilmiah oleh Ibnu Khaldun sendiri. Hanya ada tiga dari karya-karyanya yang dianggap sebagai karya ilmiah oleh Ibnu Khaldun, yaitu: *al- 'Ibar*, *Muqaddimah*, dan *al- Ta'rif*.

1. Karya-karya

Setelah menguraikan tentang masa pendidikannya, berikut ini akan dibahas mengenai hasil karya-karya Ibn Khaldun. Sebenarnya Ibn Khaldun telah menghasilkan berbagai banyak karya, namun banyak dari karya-karya tersebut yang belum ditemukan ataupun yang tidak diterbitkan sama sekali. Meskipun Ibn Khaldun hidup pada masa dimana peradaban Islam mulai mengalami kehancuran, akan tetapi beliau mampu tampil sebagai pemikir Muslim yang kreatif dan melahirkan pemikiran-pemikiran besar dalam beberapa karyanya.

Pokok-pokok pembahasan didalam kitab Muqaddimah dibagi menjadi enam bab. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut⁴²

- a. Bab pertama membahas peradaban dan kebudayaan umat manusia secara umum. Bab ini meliputi enam pengantar yang berisikan pentingnya organisasi sosial kemasyarakatan, pengaruh iklim dan letak geografis terhadap warna kulit, letak dan sistem kehidupan. Didalamnya juga membahas tentang wahyu, mimpi, kesanggupan manusia mengetahui yang gaib secara alami atau pun melalui latihan khusus.
- b. Bab kedua membahas tentang kebudayaan Badui dan suku-suku yang lebih beradab, peradaban masyarakat pengembara, bangsa dan kabilah-kabilah liar, serta kehidupan mereka. Bagian ini terdiri dari 29 pasal. Sepuluh pasal pertama berisikan bangsa-bangsa pengembara dan pertumbuhan mereka, keadaan masyarakat, dan asal-usul kemajuan.

⁴² Syafiuddin, *Negara Islam menurut Konsep Ibnu Khaldun*, h 39-41

Selain itu dibahas pula mengenai prinsip-prinsip umum pengendali masyarakat dalam nuansa sosiologi filsafat sejarah. Adapun sembilan belas pasal berikutnya memaparkan susunan pemerintahan, hukumpolitik, dan hal-hal lain yang terdapat di kalangan bangsa-bangsa tersebut.

- c. Bab ketiga membahas tentang negara, kerajaan, khilafah, tingkatan kekuasaan, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan menekankan filsafat sejarah untuk mengetahui sebab-sebab munculnya kekuasaan dan sebab-sebab runtuhnya suatu negara. Dalam bab ini dibahas secara luas mengenai negara, kedaulatan, persoalan politik dan sistem pemerintahannya.
- d. Bab keempat membahas berbagai hal tentang wilayah-wilayah pedesaan dan perkotaan, kondisi yang ada, berbagai peristiwa yang terjadi, dan hal-hal utama yang harus diperhatikan.
- e. Bab kelima membahas berbagai hal tentang sisi perekonomian negara, mata pencaharian, ekonomi, perdagangan dan industri. Dalam beberapa pasal didalamnya juga diterangkan tentang beragam ilmu pengetahuan, seperti pertanian, pembangunan, pertenunan, kebidanan, dan pengobatan.
- f. Bab keenam membahas berbagai jenis ilmu pengetahuan, pengajaran dan metode-metodenya, serta berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah tersebut dalam tradisi Arab. Selanjutnya, bab ini diakhiri dengan sastra Arab. Dari pembagian-pembagian bab diatas, terlihat jelas betapa luas dan beragamnya bidang kajian yang dihasilkan oleh Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah, yang ditujukan untuk mengkritik sejarah dalam upaya.

2. Kondisi Politik Masa Ibnu Khaldun

Ibn Khaldun hidup pada abad ke-14 M atau abad ke-8 H. Abad ini merupakan periode terjadinya perubahan-perubahan historis besar, baik dibidang politik maupun pemikiran. Bagi Eropa, periode ini merupakan periode tumbuhnya cikal bakal zaman Renaisans. Sementara bagi dunia Islam, periode ini merupakan periode kemunduran dan disintegrasi.⁴³

⁴³*Ibidh* 44-45

Ibn Khaldun menghabiskan lebih dari dua pertiga umurnya di kawasan Afrika Barat Laut, yang sekarang ini terdiri negara-negara Tunisia, Aljazair dan Maroko, serta Andalusia yang terletak di ujung selatan Spanyol. Pada masa itu kawasan tersebut menjadi kancah perebutan dan pertarungan kekuasaan antar dinasti, serta pemberontakan sehingga kawasan tersebut sering berpindah tangan dari satu dinasti ke dinasti lain. Ibnu Khaldun pun berperan dalam percaturan politik yang sarat dengan perebutan kekuasaan. Beliau seringkali berpindah jabatan dan bergeser loyalitas dari seorang penguasa ke penguasa yang lain dari dinasti yang sama. Jabatan pemerintahan pertama yang cukup berarti baginya adalah menjadi keanggotaan majelis ilmuwan Sultan Abu Inan dari Bani Marin di ibukota negara itu, yaitu Fez. Kemudian diangkat menjadi sekretaris Sultan dengan tugas mencatat semua keputusan Sultan terhadap semua permohonan rakyat, juga dokumen-dokumen lain yang diajukan kepada Sultan.⁴⁴

Selama berada di Fez, Ibn Khaldun masih terus belajar kepada para ulama dan sastrawan dari Andalusia dan Tunisia. Beliau sering mendatangi perpustakaan Fez yang dianggap sebagai perpustakaan terbesar dan terlengkap ketika itu. Kesenangan menuntut ilmu serta terjun ke dunia politik menjadi salah satu ambisinya untuk memegang jabatan penting agar bisa menguasai dan memerintah suatu daerah. Ambisi tersebut adalah untuk mengembalikan kejayaan masa lalu kakeknya, bahwa ketika masa pemerintahan Bani Hafs, kakeknya yang pertama memerintah di Tunisia dan kakeknya yang kedua memerintah di Bijayah.⁴⁵

Sebagaimana pemikir Islam lainnya, Ibn Khaldun ikut serta menyaksikan keruntuhan peradaban Islam yang sudah tidak lagi utuh seperti pada masa-masa sebelumnya. Peradaban Islam yang dulunya mengalami kejayaan, pada masa Ibn Khaldun telah berubah menjadi negara-negara kecil yang saling memusuhi. Hal ini terjadi diakibatkan oleh lemahnya pemerintahan, sering terjadinya pemberontakan, perang antar etnis, serta kerakusan negara-negara Eropa dalam menaklukkan wilayah-wilayah Arab Islam. Hal tersebut secara otomatis mempengaruhi pemikiran Ibn Khaldun.

⁴⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Ed. 5 (Jakarta: UI-Press, 1993), h 91-92.

⁴⁵ Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat*, h 70-71.

Setelah berkarir politik dengan berbagai jabatan seperti penulis naskah pidato Sultan, duta keliling kerajaan, penasehat, dan sebagai hakim kepala pengadilan di berbagai negara dalam perjalanan yang panjang, akhirnya Ibn Khaldun memutuskan untuk berhenti mengejar karir politik yang nampaknya tidak pernah memuaskan dan meminta maaf kepada raja Talmishan karena tidak mampu melaksanakan perintah yang telah dititahkan kepadanya. Beliau pun meminta izin kepada raja untuk mengasingkan diri di benteng Ibnu Salamah (sebuah wilayah di Provinsi Tojin) agar bisa berkonsentrasi dalam memikirkan realita peradaban Islam dan menulis sebuah karya ilmiah.⁴⁶

Melalui pemahaman terhadap sejarah masa lalu, Ibn Khaldun berusaha mengetahui penyebab problematika peradaban Islam yang sedang terjadi pada masanya. Kajian tersebut mencakup semua lini sosial, meliputi segi ekonomi, geografi, agama, intelektual, dan politik pada tiap-tiap peradaban manusia tanpa mengabaikan karakteristik peradaban Arab Islam.⁴⁷

Setelah memutuskan untuk berhenti dalam menggeluti dunia politik, maka Ibn Khaldun pergi meninggalkan Tunisia dan berlayar menuju Alexandria, Mesir, pada tahun 784 H/1382 M. Disana beliau bercita-cita menduduki suatu jabatan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, apalagi popularitasnya telah sampai ke Kairo-Mesir. Rakyat Mesir telah banyak mengenal tentang dirinya, autobiografinya, serta pembahasan-pembahasan sosial dan sejarahnya. Lembaga ilmu pengetahuan, pemikiran dan kesusasteraan yang berada di Kairo telah mengenal kitab Muqaddimah-nya.⁴⁸

Dengan kemasyhuran kitab Muqaddimah dan kepiawaiannya sebagai fakih madzhab Maliki, akhirnya Ibn Khaldun diangkat sebagai dosen fikih Maliki pada lembaga pendidikan Qamhiyah di Kairo, lalu diangkat pula menjadi hakim agung mazhab Maliki di Kerajaan Mesir saat itu. Namun, kendala utama bagi Ibn Khaldun ialah persaingan antara para pejabat tinggi dan ilmuwan, khususnya para ahli hukum. Karena itu, beliau berhasil difitnah karena melakukan reformasi hukum hingga dipecat dari jabatan

⁴⁶ Enan, *Biografi Ibnu Khaldun*, hlm 69.

⁴⁷ Subkhan Anshori, *Filsafat Islam Antara Ilmu dan Kepentingan*, hlm 18

tersebut Ternyata kehidupan Ibn Khaldun di Mesir pun selalu mengalami pasang-surut, sebagaimana beliau pernah dipenjarakan dalam karir politik.

B. Biografi Imam Al-Mawardi

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al- Mawardi al- Bashri (364-450 H/974-1058 M), dilahirkan di Basrah, Irak. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai perhatian yang besar kepada ilmu pengetahuan. Mawardi berasal dari kata *ma'* (air) dan *ward* (mawar) karena ia adalah anak seorang penjual air mawar. Panggilan al-Mawardi diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, berargumen dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya.⁴⁹

Panggilan al-Mawardi diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, berargumen dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya. Sedangkan julukan al-Bashri dinisbatkan pada tempat kelahirannya. Masa kecil Mawardi dihabiskan di Baghdad hingga tumbuh dewasa. Mawardi merupakan seorang pemikir Islam yang terkenal pada masanya. Ia juga dikenal sebagai tokoh terkemuka madzhab Syafi' dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya pada dinasti Abbasiyah.⁵⁰

Pemberian gelar ini sempat menimbulkan protes dari para fuqaha pada masa itu. Mereka berpendapat bahwa tidak ada seorangpun boleh menyanggah gelar tersebut. Hal ini terjadi setelah menetapkan fatwa bolehnya Jalal Ad Daulah ibn Addid Ad Daulah menyanggah gelar *Malik Al Muluk* sesuai permintaan.

⁴⁹Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), h58

Menurut mereka bahwa yang boleh menyanggah gelar tersebut hanya Allah SWT.

Al-Mawardi wafat pada tanggal 30 bulan Rabi'ul Awal tahun 450 hijrah bersamaan 27 Mei 1058 M. Ketika itu beliau berumur 86 tahun. Bertindak sebagai imam pada sholat Jenazah beliau Al-Khatib Al-Baghdadi. Banyak para pembesar dan ulama yang menghadiri pemakaman beliau. Jenazah Al-Mawardi dimakamkan di perkuburan Bab Harb Kota Mansur di Baghdad. Kewafatannya terpaut 11 hari dari kewafatan Qadi AbuTaib.

Masa kehidupan al-Mawardi ditandai dengan suasana dan kondisi disintegrasi politik dalam pemerintahan Daulah Bani Abbasiyyah. Pada masa itu Baghdad yang merupakan pusat pemerintahan Bani Abbas tidak mampu membendung arus keinginan daerah-daerah yang dikuasainya untuk melepaskan diri dari Bani Abbas dan membentuk daerah otonom. Ini akhirnya memunculkan dinasti-dinasti kecil yang merdeka dan tidak mau tunduk pada kekuasaan Bani Abbas⁵¹

Al-Mawardi merupakan seorang pemikir Islam yang terkenal pada masanya. Yaitu masa dimana ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat Islam mengalami puncak kejayaannya. Ia juga dikenal sebagai tokoh terkemuka Madzhab Syafi'i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya pada dinasti Abbasiyyah. Selain sebagai pemikir Islam yang ahli dibidang fiqh, sastrawan, politikus dan tokoh terkemuka, ia juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif

Meskipun Al Mawardi adalah orang yang dikenal di Baghdad, tetapi sumber sejarah tidak banyak mengupas tentang kehidupan keluarganya di Bashrah dan Baghdad. Pada masa pemerintahan 'Abbasiyyah, Al-Mawardi merapat kepada Khalifah 'Abbasiyyah al-Qadir Billaah setelah memberikan ringkasan kitab fiqh Syafi'i, al-Iqna.⁵²

Ketajaman pemikiran Al-Mawardi dalam bidang politik sebagaimana dijumpai dalam karyanya yang berjudul *Al-ahkam Al-Shulthoniyah* secara

⁵¹ Iqbal, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), h.16

⁵² Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2001), h. 43

antropologis dan sosiologis tidak dapat dilepaskan dari situasi politik yang tengah mengalami krisis. Pada masa itu kekuasaan Abbasiyah melemah, sebagai akibat terjadinya penuntutan pejabat tinggi dari etnis Turki untuk merebut puncak pemerintahan. Kehendak itu tentu saja menimbulkan reaksi keras dari kelompok penguasa yang menghendaki keamanan dan status quo⁵³

1. Riwayat Pendidikan

Riwayat pendidikan al-Mawardi dihabiskan di Baghdad saat Baghdad menjadi pusat peradaban, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ia mulai belajar sejak masa kanak-kanak tentang ilmu agama khususnya ilmu-ilmu hadits bersama teman-teman semasanya, seperti Hasan bin Ali al-Jayili, Muhammad bin Ma'ali al-Azdi dan Muhammad bin Udai al-Munqari.

Dalam Sejarah pendidikannya, pada masa-masa Awal, Al-Mawardi menempuh pendidikan di negeri kelahirannya sendiri, yaitu Bashroh. Di kota tersebut Al-Mawardi sempat mempelajari hadits dari beberapa ulama terkenal seperti Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibn Al-Jabaly, Abu Khalifah Al-Jumhy, Muhammad Ibn 'Adiy Ibnu Zuhar Al-Marzy, Muhammad Ibnu Al-Ma'aly Al-Azdy serta Ja'far bin Muhammad Ibn Al-Fadl Al-Baghdadi¹⁶. Menurut pengakuan muridnya, Ahmad Ibn Ali Al-Khatib, bahwa dalam bidang Al-Hadits, Al-Mawardi termasuk tsiqah.

Setelah mengenyam pendidikan di kota kelahirannya, ia pindah ke Baghdad dan bermukim di Darb Az-Za'farani. Disini Al-Mawardi belajar hadits dan fiqh serta bergabung dengan halaqah Abu hamid Al Asfarayini untuk menyelesaikan studinya. Selanjutnya, setelah ia menyelesaikan studinya di Baghdad, ia berpindah tempat ke kota lain untuk menyebarkan (mengamalkan ilmunya). Kemudian, setelah lama berkeliling ke berbagai kota, ia kembali ke Baghdad untuk mengajarkan ilmunya dalam beberapa tahun. Di kota itu ia mengajarkan Hadits, menafsirkan Al-Qur'an dan menulis beberapa kitab diberbagai disiplin ilmu, yang hal ini menunjukkan bahwa Al-Mawardi adalah seorang yang alim dalam bidang fiqh, hadits, adab (sastra), nahwu, filsafat,

politik, ilmu-ilmu social dan akhlak. Hasil karyanya yang cemerlang tersebut manjadikannya seorang penulis terkenal⁵⁴

a. As-Shaimiri

Nama lengkapnya adalah Abu Qasim Abdul Wahid bin Hasan al-Shaimari. Ia merupakan seorang hakim dan ahli fiqh bermadzhab Imam Syafi'i. Ash-Shaimari juga sebagai guru yang aktif dalam menulis. Banyak karya-karyanya dalam bentuk buku yang di gunakan sebagai silabus dalam belajar oleh murid-muridnya, antara lain; al-Idlah min al-Madzhah, al-Qiyas wa al-Ulul, al-Kifayah dan al-Irsyad. Dari ash-Shaimari lah Mawardi mendalami ilmu fiqh, kemudian seperti layaknya seorang murid seperti halnya teman-teman seangkatannya, ia mengembangkan ilmu yang telah didapatkan.

b. Al-Baqi

Al-Baqi memiliki Nama lengkap Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al-Bukhari al-Ma'ruf al-Baqi. Panggilan al-Baqi diberikan dari nama daerah di Baghdad. Ia salah satu murid dari Abi Ali bin Abi Hurairah. Al-Baqi dikenal sebagai ulama besar dan guru bahasa Arab dan sastra. Ia meninggal dunia pada tahun 398.³⁶ Dari al-Baqi Mawardi mendapatkan banyak ilmu khususnya tentang tasawuf. Dan masih banyak guru-guru Mawardi yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Dari beberapa gurunya, Abu Hamid al-Isfiraini merupakan guru yang paling berpengaruh terhadap karakteristik Mawardi. Dari Abu Hamid lah Mawardi mendalami madzhab Syafi'i dalam kuliah rutinyang diadakannya di sebuah Masjid yang terkenal dengan Masjid Abdullah ibnu al-Mubarak di Baghdad hingga ia terkenal sebagai ulama besar madzhab Imam Syafi'i.

Disamping mengajar, Al-Mawardi menekuni kegiatan ilmiah. Banyak karya tulisnya dalam bentuk kitab atau buku. Menurut sejarah, Al-Mawardi tidak menghendaki buku-buku karangannya diedarkan pada masa hidupnya, karena takut akan berubah niat menjadi riya dan akan mengurangi nilai-nilai pahala dari apa yang

⁵⁴ Imam Al Mawardi, *Adab Ad Dunya wa Ad Din, op.cit.*, h.7

telah ia usahakan, serta mengakibatkan amalnya itu tidak diterima oleh Allah. Buku-buku karyanya baru diketahui setelah ia mendekati ajal.

2. Kondisi Politik Imam Al-Mawardi

Situasi politik dunia Islam pada masa al-Mawardi yakni sejak akhir abad X sampai dengan pertengahan abad XI M. mengalami kekacauan dan kemunduran bahkan lebih parah dibandingkan masa sebelumnya. Yaitu pada masa kekhalifahan al-Mu'tamid, al-Muqtadir dan puncaknya pada kekuasaan khalifah al-Muti' pada akhir abad XI M. Di masa ini tidak ada stabilitas dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Baghdad yang merupakan pusat kekuasaan dan peradaban serta pemegang kendali yang menjangkau seluruh penjuru dunia Islam lambat laun meredup dan pindah ke kota-kota lain. Kekuasaan khalifah mulai melemah dan harus membagi kekuasaannya dengan para panglimanya yang berkebangsaan Turki atau Persia, karena tidak mungkin lagi kedaulatan Islam yang begitu luas wilayahnya harus tunduk dan patuh kepada satu orang kepalanegara.⁵⁵

Pada masa itu kedudukan khalifah di Baghdad hanya sebagai kepala negara yang bersifat formal. Sedangkan kekuasaan dan pelaksana pemerintah sebenarnya adalah para panglima dan pejabat tinggi negara yang berkebangsaan Turki atau Persia serta penguasa wilayah di beberapa wilayah. Bahkan dari sebagian golongan menuntut agar jabatan kepala negara bisa diisi oleh orang-orang yang bukan dari bangsa Arab dan bukan dari keturunan suku Quraisy. Namun tuntutan tersebut mendapat reaksi dari golongan Arab yang ingin mempertahankan hegemoninya bahwa keturunan suku Quraisy sebagai salah satu syarat untuk bisa menjabat sebagai kepala negara dan keturunan Arab sebagai syarat menjadi penasehat dan pembantu utama kepala negara dalam menyusun kebijakan.

Mawardi merupakan salah satu tokoh yang mempertahankan syarat-syarat tersebut. Untuk mensiasati masa-masa sulit yang penuh dengan kekacauan ini, pada tahun 429 H. khalifah al-Qadir mengumpulkan empat orang ahli hukum yang mewakili empat madzhab fiqih untuk menyusun ikhtisar. Diantaranya, Mawardi yang dipilih untuk mewakili madzhab Syafi'i dan

⁵⁵Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), h.58.

menulis kitab al-Iqna". Al-Quduri dipilih untuk mewakili Madzhab Hanafi dan menulis kitab al-Mukhtasyar, sedangkan dua kitab lainnya tidak begitu penting, dan Mawardi mendapat pengakuan dari khalifah ataskaryanya yang terbaik. Untuk menghargai jasanya itu, Mawardi diangkat sebagai Aqdi al-Quddah (Hakim Agung) setelah menjadi hakim di beberapa daerah⁵⁶

Al-Mawardi memulai karirnya sebagai hakim. Karena kecerdasan, kejujuran dan ketinggian akhlaknya ia diangkat menjadi hakim di Baghdad oleh khalifah Qadir. Bukan hanya itu, ia juga sangat disenangi dan dihormati oleh berbagai golongan karena kecakapan diplomasinya. Ia sering membantu dalam menyelesaikan perselisihan sehari-hari dengan pihak istana. Setelah berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain untuk melaksanakan tugasnya sebagai hakim, akhirnya ia kembali dan menetap di Baghdad dan mendapatkan kedudukan terhormat dari pemerintah dan keluarga istana sampai akhir hayatnya dengan jabatan terakhir sebagai Hakim Agung (AqdalQudad). Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri meninggal di Bagdad pada tahun 450 H atau 1059 M.

Disamping itu pengaruh dari faham keagamaan mu'tazilah yang cenderung rasionalis serta perkembangan paham syi'ah yang dianut oleh para pembesar Abasyiyah dari kalangan bani Buwaih turut mempengaruhi pola pikir mereka. Sehingga, walaupun pergolakan politik sangat dahsyat terjadi di Bagdad tidak mempengaruhi pada kegiatan kajian keilmuan. Kejayaan ilmu pengetahuan dalam Islam ini, yaitu masa dimana ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat Islam mengalami puncak kejayaannya. Telah mengkondisikan jiwa Al-Mawardi sebagai seorang yang punya semangat keilmuan yang tinggi dan berhasil mengantarkan Al-Mawardi sebagai seorang pemikir hebat. Keadaan demikian ini tidaklah mengherankan jika Al-Mawardi kemudian tumbuh sebagai pemikir Islam yang ahli dalam bidang fiqh dan sastrawan disamping juga sebagai politikus yang piawai.

Situasi politik dunia Islam pada masa Al-Mawardi yakni sejak akhir abad sepuluh sampai dengan pertengahan abad sebelas. Mengalami kekacauan dan kemunduran bahkan lebih parah dibandingkan masa sebelumnya⁵⁰. Yaitu pada masa kekhalifahan al-Mu'tamid, al-Muqtadir dan puncaknya pada kekuasaan

⁵⁶Qamaruddin Khan, "*Kekuasaan, Pengkhianatan dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori Al-Mawardi Tentang Negara*", (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000), h. 37

khalifah al-Muti' pada akhir abad IX M. Di masa ini tidak ada stabilitas dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Baghdad yang merupakan pusat kekuasaan dan peradaban serta pemegang kendali yang menjangkau seluruh penjuru dunia Islam lambat laun meredup dan pindah ke kota-kota lain.⁵⁷

Kekuasaan khalifah mulai melemah dan harus membagi kekuasaannya dengan para panglimanya yang berkebangsaan Turki atau Persia, karena tidak mungkin lagi kedaulatan Islam yang begitu luas wilayahnya harus tunduk dan patuh kepada satu orang kepala negara⁵¹.

Pada masa itu kedudukan khalifah di Baghdad hanya sebagai kepala negara yang bersifat formal. Sedangkan kekuasaan dan pelaksana pemerintah sebenarnya adalah para penglima dan pejabat tingginegara yang berkebangsaan Turki atau Persia serta penguasa wilayah di beberapa wilayah. Bahkan dari sebagian golongan menuntut agar jabatan kepala negara bisa diisi oleh orang-orang yang bukan dari bangsa Arab dan bukan dari keturunan suku Qurasy. Namun tuntutan tersebut mendapat reaksi dari golongan Arab yang ingin mempertahankan hegemoninya bahwa keturunan suku Quraisy sebagai salah satu syarat untuk bisa menjabat sebagai kepala negara dan keturunan Arab sebagai syarat menjadi penasihat dan pembantu utama kepala negara dalam menyusun kebijakan. Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh yang mempertahankan syarat-syarat tersebut.

Untuk mensiasati masa-masa sulit yang penuh dengan kekacauan ini, pada tahun 429 H. khalifah al-Qadir mengumpulkan empat orang ahli hukum yang mewakili empat madzhab fiqih untuk menyusun ikhtisar. Di antaranya, Mawardi yang dipilih untuk mewakili madzhab Syafi'i dan menulis kitab al-Iqna'. Al-Quduri dipilih untuk mewakili Madzhab Hanafi dan menulis kitab al-Mukhtasyar, sedangkan dua kitab lainnya tidak begitu penting, dan Mawardi mendapat pengakuan dari khalifah atas karyanya yang terbaik.

⁵⁷ Munawir Sjadli, *Islam dan Tata Negara, op.cit.*, h. 58

Untuk menghargai jasanya itu, Mawardi diangkat sebagai *Aqdi al-Quddah* (Hakim Agung) setelah menjadi hakim di beberapa daerah. Pengangkatan tersebut mendapat kritikan dan memunculkan keberatan oleh beberapa ahli hukum terkemuka seperti al-Thayib al-Thabari dan al-Sinsari yang menyatakan, bahwa tak seorangpun berhak atas posisi itu kecuali Allah.

Namun Al-Mawardi tidak menghiraukan keberatan itu dan tetap mempertahankan pengangkatannya sebagai *Aqdi al-Qudat* dengan alasan bahwa para ahli hukum yang sama sebelumnya telah mengakui gelar *al-Muluk al-A'zam* (Raja Agung) bagi Jalal ad-Daulah, seorang pemimpin kaum Buwaiyah, meskipun Al-Mawardi sendiri tidak mengakui secara positif kemegahan gelar tersebut.

Meskipun beraliran sunni yang bermadzhab Syafi'i, al-Mawardi tetap disenangi, baik penguasa Bani Abbas yang sunni maupun oleh penguasa Dinasti Buwaihi yang syi'ah. Bani Buwaihi senang padanya, karena Mawardi juga sering kali menyelesaikan pertikaian antaramereka.⁵⁸

⁵⁸ Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 201

BAB IV
KOMPARASI KEPEMIMPINAN MENURUT
IBN KHALDUN DAN IMAM AL-MAWARDI

A. Konsep Kepemimpinan Ibn Khaldun

1. Pengertian Pemimpin

Didalam kitab Mukaddimah, Ibnu Khaldun membicarakan istilah al-Mulk yang dapat diinterpretasikan sebagai gambaran perenungan Ibnu Khaldun tentang kondisi sosial politik di negara - negara Arab-Islam yang sering dililit konflik antar elit kekuasaan. Kekuasaan menurut Ibnu Khaldun sebenarnya terbentuk melalui suatu kemenangan kelompok tertentu atas kelompok lainnya. Kekuasaan itu merupakan kedudukan yang menyenangkan, meliputi berbagai kesenangan materi maupun maknawi, material maupu sepiritual, sehingga untuk memperoleh suatu kekuasaan itu melalui kompetisi -kompetisi menggemparkan dan hanya sebagian kecil orang yang rela menyerahkannya.

kekudukan yang dialami bagi manusia. Sebab, manusia tidak mungkin dapat melangsungkan hidupnya dan melanggengkan eksistensinya kecuali

dalam sistem kemasyarakatan dan saling membantu diantara mereka dalam upaya memperoleh kebutuhan -kebutuhan pokok.

Dalam hal kepemimpinan, Ibn Khaldun tidak menggunakan pendekatan keagamaan, tetapi lebih menekankan pada pendekatan sosial dan budaya. Ia menolak menghubungkan soal kepemimpinan dengan syari'ah, karena menurutnya bahwa eksistensi manusia itu dapat saja ada tanpa kepemimpinan agama. Di satu pihak, dalam kenyataannya agama jarang menjadi sentral pemikiran manusia, di pihak lain, negara-negara yang tidak beragama Islam jumlahnya jauh lebih banyak.⁵⁹

Hal ini berangkat dari fenomena kehidupan pada masanya, di mana orang-orang Majusi adalah mereka yang tidak menganut agama Samawi pada umumnya dan mereka tidak memiliki kitab suci yang diturunkan dari Allah, tetapi mereka memiliki Negara yang besar dan meninggalkan sejarah yang membanggakan. Dengan demikian, bahwa kepemimpinan dalam kehidupan masyarakat itu tidak mesti berdasarkan agama yang diturunkan oleh Allah, tetapi merupakan suatu kemestian hidup, manusia bermasyarakat, terlepas dari kenyataan apakah mereka menganut agama samawi atau bukan.

Ketika berbicara tentang kepemimpinan seorang pemimpin dalam kemasyarakatan, Ibn Khaldun mengatakan hal itu dapat ditegakkan dengan salah satu dari dua cara; yakni solidaritas dan factor endogen sang pemimpin. Agama dan politik bila beriringan akan memberikan kontribusi yang besar dalam menciptakan integritas social. Sebaliknya, bila tidak beriringan maka kekuatannya akan sirna, karna almulk ditimbulkan oleh superioritas yang timbul karna solidaritas dan pertolongan Allah untuk menegakkan agama.

2. Corak kepemimpinan

Pemikiran politik Ibn Khaldun dalam hal kepemimpinan, ini terbagi menjadi 6 bagian⁶⁰ :

1. Negara: Suatu bentuk organisasi.
2. Keharusan mendirikan lembaga kepemimpinan.
3. Kualifikasi pemimpin.
4. Cara pengangkatan pemimpin.
5. Hubungan antara pemimpin dan rakyat.

⁵⁹ Mukti Ali, *Ibn Khaldun dan Asal-usul Sosiologi* (Yogyakarta: Nida', 1979), h. 22

⁶⁰ Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Terj. A. Thaha (Jakarta: Temprin, 1986), h. 289

6. Pola kepemimpinan rakyat

Negara Menurut Ibn Khaldun, negara mempunyai keterkaitan erat dengan peradaban, keduanya bertalian erat dan saling mengisi. Suatu negara tanpa peradaban sukar untuk dibayangkan bagaimana wujudnya. Sebaliknya peradaban tanpa negara adalah tidak mungkin karena hal itu bertumpu pada naluri manusia untuk bekerja sama. Keberadaan suatu negara didukung dan ditentukan oleh solidaritas, karena inti suatu negara adalah solidaritas. Untuk menjelaskan bagaimana berlakunya solidaritas dalam masyarakat dan pembentukan negara, Ibn Khaldun mengangkat contoh Negara-negara pra Islam maupun sesudah Islam di mana Byzantium, Persia, dan Arab muncul kemudian hancur karena unsur solidaritas dalam negara tersebut.

Kebiasaan mereka setelah suatu negara berdiri teguh, ia bisa saja menyingkirkan ashabiyat dan orang cenderung melupakan masa-masa awal berdirinya suatu negara. Karena keluarga secara turun temurun menjadi pemimpin yang diakui dan dipatuhi, maka mereka merasa sudah tidak lagi membutuhkan ashabiyat untuk mempertahankan negara mereka.

Dalam pandangan Ibn Khaldun tipologi negara dengan tolak ukur kekuasaan dibagi menjadi dua⁶¹:

1. Al-Mulk al-Thabi'iy: Negara dengan ciri kekuasaan alamiah. Ciri negara ini biasanya sang pemimpin berlaku sewenang-wenang dan cenderung dictator, sehingga prinsip keadilan diabaikan, yang terpenting hanya keunggulan dan kekuatan.
2. Al-Mulk al-Siyaasiy: Negara dengan ciri kekuasaan politik. Negara ini terbagi menjadi:
 - a. Negara hukum (siyasah diniyah), adalah Negara yang menjadikan syariah (hukum Islam) sebagai fondasinya. Dengan demikian Negara semacam ini di samping berkarakteristik al-Quran dan hadis, juga menempatkan akal manusia dalam perannya yang sangat urgen dalam kehidupan bernegara. Tipe ini merupakan satu-satunya bentuk tata politik dan cultural yang permanen.¹⁹

⁶¹M. Sastrapratedja, *Pokok-pokok Pandangan Ibn Khaldun Mengenai Kekuasaan Politik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1977), h. 99

- b. Hukum Sekuler (Siyasah aqliyah), adalah Negara yang hanya mendasarkan pada hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan hukum yang bersumber dari wahyu.
- c. Republik ala Plato (siyasah Madaniyah), dalam Negara ini segelintir orang elit duduk sebagai penguasa memerintah atas segolongan budak-budak.

Kualifikasi Pemimpin Jabatan pemimpin politik merupakan jabatan yang penting dan menentukan. Dikatakan penting karena masyarakat manusia memerlukan panata untuk mengatur hubungan antar manusia karena masing-masing memiliki kekuatan untuk saling berperang. Karena itu berarti bahwa masyarakat manusia memerlukan pemimpin yang akan melaksanakan kekuasaan, mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia dari sifat agresifitas. Maka pemimpin harus memenuhi persyaratan tertentu agar ia mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.

Sebenarnya arti kepemimpinan bagi Ibn Khaldun adalah supervisi terhadap kepentingan Negara muslim baik yang berkenaan dengan persoalan agama maupun keduniaan.²³ Untuk itu seorang pemimpin menurut Ibn Khaldun adalah:

- 1. Harus berasal dari kalangan sendiri.
- 2. Mempunyai kemampuan menguasai warganya.
- 3. Mempunyai kekuatan, kewibawaan serta kewenangan. Dan inilah yang disebut al-Mulk.

Di samping itu, persyaratan seorang pemimpin adalah:

- 1. Berilmu pengetahuan.
- 2. Bersifat adil.
- 3. Kafayat (mampu), dalam hal ini mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh undang-undang, mampu memobilisasirakyat, mampu mengendalikan politik kenegaraannya, mampu berdiplomasi dan lain sebagainya.
- 4. Sehat jasmani dan rohani.

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa seorang pemimpin sebaiknya harus memiliki ghalabah, sultan dan kewenangan untuk melakukan kekerasan. Namun Ibn Khaldun cenderung berpendapat bahwa seorang pemimpin harus kharismatik. Karena itu sikap seorang pemimpin:

1. Perhatiannya harus ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, hal ini seperti pepatah pujangga jawa: gemah ripah loh jinawi, tata tentram kerta raharja.²⁶
2. Harus mengawasi system kerja aparatnya dan selalu mempunyai informasi tentang mereka.
3. Seorang pemimpin harus selalu terbuka dalam hal menerima keluhan rakyatnya dan berusaha memenuhinya.
4. Seorang pemimpin merasa bahwa kekuasaan itu merupakan suatu beban yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

Jadi, seorang pemimpin menurut Ibn Khaldun adalah seseorang yang menganggap kekuasaannya sebagai amanah dari Allah, sehingga pelaksanaan kekuasaannya dianggap tidak lain sebagai cara terbaik pengabdian kepada Tuhan.

Dari pemaparan di atas, penulis dapat menarik benang merah bahwa, pertama, pemikiran politik Ibn Khaldun timbul karena berangkat dari kondisi social pada masa kehidupannya yang sedang mengalami kemunduran dan perpecahan. Kedua, Ibn Khaldun berpendapat bahwa kehancuran dan perpecahan tersebut karena pada dasarnya manusia memiliki sifat ingin selalu memiliki, merampas dan menguasai milik sesamanya. Untuk itu perlu adanya pemimpin yang dapat mengendalikan mereka. Ketiga, arti kepemimpinan bagi Ibn Khaldun adalah supervise terhadap kepentingan Negara muslim, baik yang berkenaan dengan persoalan agama maupun keduniaan, maka seorang pemimpin haruslah seseorang yang mempunyai ghalabah, sultan dan wewenang. Keempat, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang sadar bahwa suatu saat pertanggungjawabannya akan dipertanyakan di hadapan Tuhan.

B. Konsep Kepemimpinan Al-Mawardi

1. Pengertian Kepemimpinan

Istilah pemimpin dalam Islam ada beberapa bentuk, yaitu *khalifah*, *imamah*, *imarah*, *wilayah*, *sultan*, *mulk*, dan *ri'asah*. Setiap istilah ini mengandung arti pemimpin secara umum. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks pemimpin pemerintahan dan kenegaraan, yaitu, *khalifah*, *imamah*, dan *imarah*. Oleh karena itu, pembahasan pemimpin dalam Islam diwakili oleh ketiga istilah ini, namun al-Mawardi lebih sering menggunakan istilah *imam/imamah*. *Imamah* menurut al-Mawardi adalah suatu kedudukan atau jabatan yang dia dakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikandunia.⁶²

Menurut al-Mawardi *imamah* berfungsi mengganti peranan kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia.⁹⁴ Posisi *imam* ini mempunyai implikasi moral untuk berusaha menciptakan kesejahteraan hidup bersama berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan. Kepemimpinan dan kekuasaan harus tetap diletakkan dalam rangka menjaga eksistensi manusia yang bersifat sementatara.

Yang dimaksud oleh al-Mawardi dengan *imam* adalah *khalifah*, raja, shulthan atau kepala Negara, dan dengan demikian Mawardi memberikan juga

⁶²A. Djazuli, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet.ke-4,h.56

baju politik. Menurutnya, Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (*khalifah*) nabi, untuk mengamankan agama, dengan disertai mandate politik. Dengan demikian seorang *imam* disatu pihak adalah pemimpin agama, dan dipihak lain adalah pemimpin politik⁶³

Dalam hal syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, al-Mawardi memberikan kriteria terhadap orang yang berhak dipilih sebagai pemimpin (imam) dengan tujuh syarat yaitu:

- a. Adil dengan ketentuan-ketentuannya.
- b. Ilmu yang bisa mengantarkan kepada ijtihad dalam ilmu yang bisa mengantarkan kepada ijtihad dalam menetapkan permasalahan kontemporer dan hukum-hukum.
- c. Sehat jasmani, berupa pendengaran, penglihatan dan lisan, agar ia dapat langsung menangani tugas kepemimpinan.
- d. Normal (tidak cacat), yang tidak menghalanginya untuk bergerak dan bereaksi.
- e. Bijak, yang bisa digunakan untuk mengurus rakyat dan mengatur kepentingan negara.
- f. Keberanian, yang bisa digunakan untuk melindungi wilayah dan memerangi musuh.
- g. Nasab yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma' para ulama. Kita tidak perlu menggubris Dhirar yang berpendapat nylenah dan membolehkan jabatan *imam* (pemimpin) dipegang orang-orang non Quraisy. Karena Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* meminta orang-orang Anshar yang telah membai'at Sa'ad bin Ubadah untuk mundur dari jabatan *imamah* (kepemimpinan) pada peristiwa *Saqifah*.

⁶³Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Pess, 1993), Edisi ke-5, h.63.

Ketujuh syarat tersebut harus dipenuhi saat seseorang dipilih atau diberi mandat untuk menjabat sebagai kepala Negara atau pemimpin. Syarat ahlul ijtihad bagi calon pemimpin merupakan hal yang paling penting, karena mengemban tugas sebagai pemimpin sangatlah berat untuk dilaksanakan jika tidak mempunyai ilmu yang luas.

Nilai lebih dalam hal kebijakan, kesabaran, keberanian, sehat jasmani dan rohani serta kecerdikan merupakan kriteria yang mutlak harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Tanpa memiliki kriteria itu, seorang pemimpin akan kesulitan dalam mengatur dan mengurus negara dan rakyatnya.

2. Tugas Pemimpin

a. Tugas Pemimpin

Menurut al-Mawardi tugas seorang pemimpin (imam) secara umum ada sepuluh:

- 1) Memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya dan kokoh dalam segala sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama salaf. Jika muncul ahlid^{bid} atau ahlisyubhat yang merusak cirri agama, seorang imam harus mampu menegakkan hujah dihadapannya, menerangkan kebenaran kepadanya dan memberinya sanksi sesuai dengan hak dan hukum yang berlaku. Dengan begitu agama terbentengi dari upaya penyimpangan dan umat terhindar dari upaya penyesatan.
- 2) Memberlakukan hukum diantara dua pihak yang saling berselisih dan menghentikan permusuhan diantara dua pihak yang saling bertikai.
- 3) Melindungi Negara dan tempat-tempat umum dari kejahatan agar rakyat dapat mencari penghidupan dan bepergian dengan aman dari gangguan-gangguan yang mengancam jiwa dan harta.
- 4) Menegakkan hukum dengan tegas agar segala yang dilarang oleh Allah SWT. Tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hak

hamba- Nya agar tidak mudahdiselewengkan.

- 5) Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh tidak mampu menemukan jalan masuk sedikitpun untuk menodai kehormatan atau menumpahkan darah orangIslam
- 6) Memerangi para penentang Islam yang sebelumnya telah didakwai hingga mereka masuk Islam atau menjadi *ahli dzimah* (orang non muslim yang hidup dalam Negara Islam dan menerima perlindungan dan keamanan sebagai balasan karena membayar pajak perorangan). Tujuannya adalah agar hak Allah SWT.
- 7) Mengambil harta *fai* (harta yang diperoleh pasukan dengan jalan damai, tanpa peperangan) dan memungut zakat sesuai yang diwajibkan syari'at baik secara nash maupun ijtihad, tanpa disertai rasa takut dan terpaksa.
- 8) Menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya yang diambil dari Baitul Mal (Kas Negara) tanpa berlebihan ataupun berhemat, juga mengalokasikanya tepat waktu (tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat).
- 9) Mengangkat orang-orang yang jujur dan professional dibidangnya, termasuk orang yang ahli dalam mengurus keuangan. Denganbegituditangan mereka, tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik dan urusan keuangan dapat terbukukan dengan rapi.
- 10) Berusaha untuk turun langsung kelapangan dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan umat sehingga tampak ia sendiri yang memimpin rakyat dan melindungi agama. Hal itu tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dengan alasan sibuk beristirahat atau beribadah. Jika hal itu terjadi, sungguh ia telah berkhianat kepada rakyat dan menipu penasihatnegara

3. HakPemimpin

Al-Mawardi menyebutkan ada dua hak seorang pemimpin, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, apa bila melihat sejarah

ternyata ada hak lain bagi pemimpin, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari baitul Mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin.

Hak-hak lain seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas kepemimpinan negara adalah :

1. Hak mendapat penghasilan(al-Qasimy).
2. Hak ini terang adanya, sebab imam telah melakukan pekerjaan demi kemaslahatan umum, sehingga tak ada waktu lagi baginya memikirkan kepentingan pribadinya. Hal ini jelas sekali jika dilihat dari ukuran sekarang, meskipun lain halnya dibandingkan masa-
Hak mengeluarkan peraturan (Haqal-Tasyri“)

Seorang pemimpin juga berhak mengeluarkan peraturan yang mengikat warganya, sepanjang peraturan itu tidak terdapat dalam al-Qur“an dan mengikuti al-Sunnah. Dalam mengeluarkan peraturan-peraturan imam mestilah mengetahui kaedah-kaedah dan pedoman-pedoman yang terdapat dalam Nash. Yang terpenting diantaranya ialah bermusyawarah, yakni dalam mengeluarkan suatu peraturan, ini tidak boleh bertindak sewenang-wenang, ia harus mempertimbangkan fikiran dari para ahli dalam masalah yang bersangkutan. Selain itu peraturan tersebut juga tidak boleh bertentangan dalam nash Syara“ atau dengan ruh-tasyri“ dalam al-Quran dan Sunnah.

C. Analisis Komparatif pendapat Ibn Khaldun & Imam Al-Mawardi

Dari analisis komparatif kepemimpinan diantara kedua tokoh terdapat perbedaan dan persamaan tentang konsep kepemimpinan.

Apabila dilihat dari syarat diadakannya sebuah kepemimpinan dalam bernegara yang digagas oleh Ibn Khaldun dan Imam Al-Mawardi hampir sama yakni:

1. Beriman Kepada Allah dan Rasul-Nya
2. Beragama Islam
3. Berpengetahuan luas

4. Adil dalam berkuasa
5. Sehat jasmani dan rohani
6. Menjalankan amanah dengan tanggung jawab.

Inti konsep kepemimpinan dalam pandangan ibn Khaldun adalah seseorang yang menganggap kekuasaannya sebagai amanah dari Allah, sehingga pelaksanaan kekuasaannya dianggap tidak lain sebagai cara terbaik pengabdian kepada Tuhan.

Pertama, pemikiran politik Ibn Khaldun timbul karena berangkat dari kondisi social pada masa kehidupannya yang sedang mengalami kemunduran dan perpecahan dalam peradaban Islam

Kedua, Ibn Khaldun berpendapat bahwa kehancuran dan perpecahan umat Islam karena pada dasarnya manusia memiliki sifat ingin selalu memiliki, merampas dan menguasai maka dari itu perlu adanya pemimpin yang dapat mengendalikan mereka.

Ketiga, arti kepemimpinan bagi Ibn Khaldun adalah supervise terhadap kepentingan Negara muslim, baik yang berkenaan dengan persoalan agama maupun keduniaan, maka seorang pemimpin haruslah seseorang yang mempunyai ghalabah, sultan dan wewenang.

Keempat, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang sadar bahwa suatu saat pertanggungjawabannya akan dipertanyakan di hadapan Tuhan.

Dalam pandangannya mengenai kepemimpinan, pada dasarnya Ibn Khaldun tidak memaparkan secara lebih terinci mengenai bagaimanakah model kepemimpinan yang baik, layak dan sesuai dengan sejarah keberhasilan Rasulullah yang ditinjau dari sejarah atau sesuai dengan prospek islam. Melainkan sebaliknya Ibnu Khaldun justru lebih mengemukakan secara umum, yaitu sifat-sifat apa saja yang diperlukan bagi seorang pemimpin yang islami.

Inti konsep kepemimpinan Imam Al-Mawardi bahwasannya pemimpin dalam Islam terdapat tuga istilah yang sering digunakan dalam konteks pemimpin pemerintahan dan kenegaraan, yaitu, *khalifah*,

imamah, dan *imarah* namun al-Mawardi lebih sering menggunakan istilah *imam/imamah*. *Imamah* menurut al-Mawardi adalah suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengatur kehidupan manusia di muka bumi.

Dalam konteks kepemimpinan imam al-mawardi sangat detail sekali dalam pemilihan pemimpin dalam sebuah negara mulai dari karakteristik, cara pemilihan hingga syarat dan penentuannya. Maka dari itu sangat teliti sekali karena bergantung dalam sebuah tanggung jawab pemimpin dalam memimpin dalam negara.

Perbedaan kepemimpinan ibn khaldun dan imam al-mawardi

Menurut ibn khaldun

pemimpin atau sebuah Kerajaan dan dinasti hanya bisa ditegakkan atas bantuan dan solidaritas rakyat banyak, sebagaimana telah kita ketahui, sebabnya ialah bahwa kemenangan atau terhindarnya dari kekalahan adalah di pihak yang mempunyai solidaritas lebih kuat dan yang anggota-anggotanya dan lebih sanggup berjuang dan bersedia mati guna kepentingan bersama.

Seorang kepala negara dan raja, agar mampu secara efektif mengendalikan ketertiban negara dan melindunginya baik terhadap gangguan dari dalam maupun dari luar harus memiliki wibawa yang besar dan kekuatan fisik yang memadai. Maka dari itu harus memerlukan solidaritas kelompok yang besar dan kuat supaya kuat menghadapi tantangan.

As-shabiyyah bertujuan untuk mewujudkan al-mulk karena memberikan perlindungan, memelihara pertahanan bersama. Karena sudah menjadi tabiat manusia untuk mencapai itu sesama membutuhkan pemimpin berperan agar tidak menjadi permusuhan terjadi antara sesama.

Ibn khaldun mengulangi kembali bahwa manusia tidak mungkin dapat hidup tanpa organisasi masyarakat dan tanpa kerja sama dengan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan

Menurut imam al-mawardi

Pemimpin sering merujuk pengertian *ulil amri* atau pejabat yaitu orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain dan *khadimul umat* (pelayan umat) dengan pengertian seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayanmasyarakat.

Pemimpin dalam Islam ada beberapa bentuk, yaitu khalifah, *imamah*, *imarah*, *wilayah*, *sultan*, *mulk*, dan ri'asah. Setiap istilah ini mengandungarti pemimpin secara umum. Namun istilah yang sering digunakan al-Mawardi dalam konteks pemimpin pemerintahan dan kenegaraan, yaitu *imamah*.

Menurut al-Mawardi *imamah* berfungsi mengganti peranan kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Posisi *imamah* ini mempunyai implikasi moral untuk berusaha menciptakan kesejahteraan hidup bersama berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan.

Yang dimaksud oleh al-Mawardi dengan pemimpin adalah *imamah*, khalifah, raja, shulthan atau kepala Negara, dan dengan demikian Mawardi memberikan juga baju politik. Menurutnya, Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti Nabi SAW, untuk mengamankan agama, dengan disertai mandat politik. Dengan demikian seorang imam disatu pihak adalah pemimpin agama, dan dipihak lain adalah pemimpin politik.

Al-Mawardi mengharuskan seorang pemimpin harus seorang mujtahid, maka tidak dibenarkan mengangkat menjadi pemimpin orang yang bukan mujtahid. Dengan alasan karena pemimpin akan menghadapi persoalan-persoalan yang timbul saat memimpin. Apalagi jika terjadi perselisihan antara rakyat dan pejabatnya, maka tidak ada pilihan lain kecuali jika pemimpin adalah seorang mujtahid agar dapat mengistimbatkan sendiri hukumnya tanpa bergantung pada orang lain

Berawal dari konsep pemimpin yang tertuang dalam prinsip-prinsip kepemimpinan tersebut, kemudian akan memunculkan kriteria pemimpin yang ideal dalam konsepsi Islam. Adapun kriteria pemimpin ideal menurut al-Mawardi adalah sebagai berikut: adil, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, mempunyai pandangan kedepan, mempunyai keberanian dan kekuatan serta mempunyai kemampuan dan wibawa

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jelas sekali betapa syarat adil adalah sangat perlu pada pemimpin agar dapat menyempurnakan urusan-urusan besar kepemimpinan itu, serta mendukung peran politik dan kekuasaan yang menjadi tanggungannya. Begitu halnya dengan ilmu pengetahuan merupakan aspek yang menjadikan diri pemimpin itu sempurna dan sebagai panduan kepadanya mengemudi beban terpikul dipundaknya. Soal kesempurnaan kesihatan yang bebas dari sebarang bentuk kecacatan amat penting bagi kepemimpinan kerana ia berkait dengan banyak kendalian wajib dilaksananya. Sangat pasti perlunya ada pada diri pemimpin adalah pakej diri dengan punya kesanggupan, kompetensi, berwawasan dan berani dalam mengemudi tanggungjawabnya yang besar lagi luas, serta segala cabaran dan halangan di mana bisa menggugat ia melaksanakan amanah kepemimpinan.

Manakala soal keturunan dalam konteks semasa sama juga perihalnya keberadaan Quraisy di bumi Makkah iaitu kaum paling majoriti haruslah memegang teraju kepemimpinan. Bermakna, kedua-dua tokoh yakni Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun telah menggaris syarat-syarat dan huraian hujah yang menepati hukum Islam.

Demikian dari analisis, komparatif dan analitis yang dilaksanakan dapatlah disimpulkan bahawa pandangan Ibnu Khaldun sebagaimana syarat-syarat digariskannya dalam Mukaddimah lebih kuat berdasarkan huraian hujah

diberikan beliau. Ia lebih menjejak dengan realitas semasa umat Islam di zaman ini yang hidup di seluruh pelusuk muka bumi dengan bernegara sendiri secara majoritas atau kaum lain sebagai minoritas. Malah, ada pula yang berada di bawah kekuasaan pihak lain sama ada pemerintahan kafir atau pecahan mazhab, mahupun diketuai kaum minoritas.

Ketika sama, umat Islam kini sedang berhadapan kerencaman dan cabaran yang bukan sahaja cuba menggugat pegangan agama kepada Allah S.W.T, bahkan menghalang pelaksanaan syariat, serta menggoncang keharmonian dan kerukunan hidup, termasuk menghambakan mereka dengan desakan-desakan material hingga melunturkan akhlak dan ibadah. Akhirnya, umat Islam sekalipun memiliki tanah air sendiri dan majoritas dalam negara mereka, tetapi masih berserabutan untuk mengangkat teraju kepemimpinan yang dapat memandu mereka kepada hakikat ditetapkan Allah.

Demikian segala itu, garis syarat dikemukakan Ibnu Khaldun paling ideal dan realitas untuk dipakai di semua kondisi tersebut bermula dengan ilmu sebagai satu kekuatan yang teramat penting dipunyai kepemimpinan. Dengan ilmu dalam situasi zaman global ini, seseorang pemimpin bagaikan mempunyai segala alat keperluan untuknya mengatur kepemimpinan. Diikuti adil sebagai sifat peribadi yang akan menyempurnakan tindakannya serta mencapainya tujuan-tujuan agama melalui pemerintahan. Kerana beban dan cabaran kepemimpinan era ini sukar tercapai tanpakekuatan keadilan. Dengan keperibadian sedemikian dan dipandu pula oleh kekuatan ilmu, sudah begitu unggul dan sempurna secara ideal bagi kepemimpinan, apatah lagi apabila diterjemahkannya secara realitas hakikat.

Dilengkapkan pula sang pemimpin dengan kesanggupannya meliputi segala kompetensi yang tentu sekali membantunya berdaya maju, selain kuat untuk menempuh sebarang mehnah. Ditambah oleh dirinya yang sempurna bebas dari sebarang cacat cela pancaindera dan fizikal serta punya kewenangan bertindak tanpa dipengaruhi sesiapaupun. Juga dukungan solidaritas sosial (assobiyah) dari merekamereka yang dekat dengannya sama ada satu bangsa dan negara atau keturunannya, akan merealisasikan segala cita-cita dan agenda bakal terlaksana

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, F. (2005). *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah.
- Abdurrahman, D. (1999). *metode penelitian sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ahmad, J. (1996). *Seratus Muslim Terkemuka*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- al-Khudhairi, Z. (1987). *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*. Bandung: Pustaka.
- Al-Mawardi. (1991). *al-Ahkam al-Sulthaniyah, Politik dan Negara dalam Islam*.
Yogyakarta: Pustaka LSI.
- Anshori, S. (2011). *Filsafat Islam Antara Ilmu dan Kepentingan*. Surabaya: Pustaka
Azhar.
- Budiarjo, M. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Effendy, B. (n.d.). *Teologi Baru Politik Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*.
Yogyakarta: Galang Press.
- Gani, I. (1987). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasan, N. (2012). *Islam Politik Di Dunia Kontemporer: Konsep, Geneologi dan teori*.
Yogyakarta: SUKA Press.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta:
Gema insani.
- Khaldun, I. (2001). *Muqaddimah*. Bierut: Dar Al-Kitab Al Arabi.

- Madjid, A. A. (2003). *Gagasan Cak Nur tentang Negara dan Islam*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Mufti, M. (2015). *politik Islam sejarah dan pemikiran*. Bandung: Pustaka Setia.
- Notosusanto, N. (1971). *Norma-norma Dasar Penelitian Penulisan Sejarah*. Jakarta: Dephankam.
- Rais, M. D. (2001). *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ramadhan, S. (2003). *Menegakkan Kembali Khilafah Islamiyah*. Jakarta: Panjimas.
- Sadzali, M. (1993). *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Syafiuddin. (2007). *Negara Islam menurut Konsep Ibnu Khaldun*. Yogyakarta: Gama Media.

